

**ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL DAN TRILOGI AKUNTABILITAS
UNTUK MENCEGAH TERJADINYA *FRAUD*
PADA SISTEM MANAJEMEN HAJI
(Studi Pada Kementerian Agama Wilayah Bulukumba)**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Salah satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Akuntansi Jurusan Akuntansi pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SRI ROSFINA UMAR

10800113005

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Rosfina Umar

NIM : 10800113005

Tempat, Tgl. Lahir : Bulukumba, 24 november 1995

Jur/Prodi/Konsentrasi : Akuntansi

Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Jl. Samratulangi

Judul : Analisis Pengendalian Internal dan Trilogi Akuntabilitas
untuk Mencegah Terjadinya *Fraud* pada Sistem Manajemen
Haji (studi pada Kementerian Agama Bulukumba)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Desember 2017

Penyusun

SRI ROSFINA UMAR

10800113005



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II: Jl. Slt. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 424835 Fax. 424836

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Analisis Pengendalian Internal dan Trilogi Akuntabilitas Untuk Mencegah Terjadinya *Fraud* pada Sistem Manajemen Haji (Studi pada Kementerian Agama Wilayah Bulukumba)”, yang disusun oleh Sri Rosfina Umar, NIM: 10800113005, Mahasiswi jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 28 November 2017, bertepatan dengan 9 Rabi’ul-Awwal 1439 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi.

Makassar, 28 November 2017
9 Rabi’ul-Awwal 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.

Sekretaris : Dr. H. Abd. Wahab, SE., M.Si.

Penguji I : Mustakim Muchlis, SE., M.Si.

Penguji II : Memen Suwandi, SE., M.Si.

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.

Pembimbing II : Sumarlin, SE., M.Ak.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19580221 198703 1 002

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Puji dan syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. Sang pemilik hati yang hakiki senantiasa melimpahkan nikmat rahmat-Nya, nikmat kasih sayang-Nya dan hidayah-Nya kepada hamba-Nya sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Salawat salam kepada Nabi junjungan umat islam Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengangkat derajat manusia dari masa kobodohan menuju masa gemilang yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi dengan judul **“Analisis Pengendalian Internal dan Trilogi Akuntabilitas dalam Mencegah Terjadinya *Fraud* Pada Sistem Manajemen Haji”** merupakan salah satu syarat yang harus di laksanakan guna mendapat gelar sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulisan skripsi ini menuai banyak hambatan dan rintangan, namun adanya dukungan moril maupun materil dari segenap pihak dengan penuh rasa syukur peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Sehingga dengan sangat berterimakasih peneliti menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah membantu.

Secara khusus peneliti menyampaikan rasa terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda terkasih Umar dan ibunda tersayang Suhartini dengan segala kebaikannya telah merawat, mengasuh, dan mendidik peneliti dari kecil hingga

tumbuh menjadi sosok putri dengan segala kemampuannya mampu mengenyam pendidikan yang layak.

Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Dekan
3. Bapak Jamaluddin M, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan dan Bapak Memen Suwandi, SE., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Memen Suwandi, SE., M.Si selaku penasihat Akademik yang selalu memberikan nasihat dan arahan-arahan.
5. Bapak Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Sumarlin, SE., M.Ak selaku pembimbing II dengan segala keihlasan telah memberikan bimbingan dan petunjuk hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada peneliti.
7. Seluruh Staf Akademik, Dan Tata Usaha, Serta Staf Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar.
8. Kementerian Agama Bulukumba karena telah memberikan izin Untuk melakukan Penelitian.

9. Kedua kakak saya, yang sudah menjaga saya selama berkuliah, kepada Syamsul Umar dan Saeful Umar, terimakasih karena sudah mendukung dan membantu saya selama ini tanpa pernah mengeluh. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT Amiin.
10. Seluruh mahasiswa jurusan akuntansi UIN Alauddin Makassar, kakak-kakak, adik-adik, terimakasih atas persaudaraan yang telah terjalin.
11. Teman-teman seperjuanganku Akuntansi 2013 terkhusus Akuntansi A terimakasih atas segala motivasi dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teruntuk sahabat-sahabatku Syamaratul Fuad, Indah Chairun Nisa, Riska, Sugi Astuti Sunusi dan Andi Urfia Awaliah dan Ahmad Rivaldi terimakasih atas motivasi, semangat dan do'a yang tiada henti selama berada di bangku kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman sesama pecinta drama, yang telah ada untuk memberikan hiburan untuk Sugi Astuti Sunusi, Hasnawati dan Sri Wahyuni, terimakasih sudah menjadi teman yang hadir selama 4 tahun perkuliahan dengan hobi yang sama.
14. Teman-teman KKN Angkatan 54 di Desa Timusu Kecamatan Liliriaja, Soppeng terkhusus teman posko yang kami sebut Timusu SQUAD yakni Rahman, Muh. Zulhajar syam, Rastyo Budiono, Muh. Nur Agus, Miftahul Jananah, Nur Amina, Sri Anna Sulfia, Irna, dan Fatmawati terimakasih atas tali persaudaraan yang selalu terjalin.

15. Kepada Nurhayati, tante yang sudah mengizinkan saya untuk tinggal dan merepotkan diri untuk menegur saya selama saya berkuliah dan menjadi orangtua saya selama menempuh pendidikan.
16. Semua keluarga, teman-teman, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu peneliti dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi peneliti.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, skripsi ini peneliti persembahkan sebagai upaya maksimal dan memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada UIN Alauddin Makassar dan semoga skripsi yang peneliti persembahkan ini dapat bermanfaat. peneliti memohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Saran dan kritik yang membangun tentunya sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan skripsi ini.



Peneliti,

SRI ROSFINA UMAR

10800113005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka	12
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. <i>Stewardship Theory</i>	15
B. <i>Shariah Enterprise Theory</i>	16
C. Pengendalian Internal	18
D. Trilogi Akuntabilitas	23
E. <i>Fraud</i>	26
F. Manajemen Haji Indonesia.....	27
G. Rerangka Fikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	36

B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Jenis dan Sumber Penelitian.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Data Informan Penelitian.....	40
F. Instrumen Penelitian.....	40
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	41
H. Pengujian Keabsahan Data	42
 BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	44
B. Manajemen Pelayanan Jama'ah Haji di Kementerian Agama di Kabupaten Bulukumba	52
C. <i>Waiting List</i> (Daftar Tunggu) dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Bulukumba.....	59
D. Efektifitas (SISKOHAT) Sistem Komputerisasi Haji dan umroh Terpadu dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Bulukumba.....	63
E. Pengendalian Internal dalam Mencegah Terjadinya fraud pada Sistem Manajemen Haji di Kementerian Agama Bulukumba.....	67
F. Trilogi Akuntabilitas Dalam Mencegah Fraud Pada Manajemen Haji Kementerian Agama Bulukumba	74
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	85
B. Implikasi Penelitian	86
 DAFTAR PUSTAKA	
 RIWAYAT HIDUP	
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 :Data Daftar Tunggu Haji, Kuota dan Tahun Berangkat	2
Tabel 1.2 :kajian pustaka.....	12



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Trilogi Akuntabilitas	25
Gambar 2.2 : Tingkatan Manajemen.....	29
Gambar 2.3 : Rerangka Fikir	35
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba.....	50
Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Penyelenggara Haji dan Umroh	51
Gambar 4.3 : Hubungan Tuhan, Alam, dan Manusia	75



ABSTRAK

Nama : Sri Rosfina Umar

NIM : 10800113005

Judul : Analisis Pengendalian Internal dan Trilogi Akuntabilitas dalam Mencegah Terjadinya *Fraud* Pada Sistem Manajemen Haji di Kementerian Agama Bulukumba

Kementerian Agama adalah wadah utama bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan yang diperintahkan oleh Allah swt. Sehingga kepercayaan masyarakat akan kinerja dan tanggungjawab Kementerian Agama sangat tinggi. Namun beberapa tahun belakangan ini masyarakat diresahkan dengan makin lamanya daftar tunggu yang diberikan oleh pihak Kementerian Agama. Kekhawatiran masyarakat tidak tanpa alasan, adanya *waiting list* mampu memberikan kerugian yang cukup berarti bagi calon jamaah haji, hal ini dikarenakan seseorang yang sudah mendaftar dan masuk sebagai daftar tunggu bisa saja menunggu sampai 25 tahun lamanya atau bahkan lebih, tergantung dari wilayah calon jamaah haji tersebut berada.

Bulukumba sendiri menurut data terakhir berada pada posisi 5 dengan urutan *waitig list* paling lama waktu keberangkatannya. Dari fenomena *waiting list* tersebut peneliti ingin mengkaji dan menganalisa bagaimana control yang diterapkan oleh Kementerian Agama Bulukumba, sehingga *waiting list* tersebut bisa terjadi, dan apakah tanggung jawab yang diberikan oleh pihak Staf manajemen haji sudah terlaksanakan dengan baik. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi interpretative, dengan teknik analisis data triangulasi.

Adapun hasil penelitian yang peneliti lakukan menemukan bahwa, pnegndalian internal yang diterapkan oleh Kementerian Agama khususnya Manajemen haji sudah cukup baik, namun masih harus ditingkatkan kembali, hal ini karena manajemen haji di Kementerian Agama Bulukumba belum membatasi dan meyeleksi calon jamaah haji yang ingin mendaftar sehingga masih menumpuknya daftar tunggu yang ada, serta tanggungjawab yang diberikan oleh Kementerian Agama mengenai waktu keberangkatan ditemukan bahwa masih belum transparansinya proses pengelolaan haji.

Kata kunci: *Trilogi Akuntabilitas, Waiting List, Manajemen Haji Dan Pengendalian Internal*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir ini masyarakat dikejutkan dengan adanya kasus korupsi dana Haji yang dilakukan oleh Menteri Agama yang kala itu menjabat. Modus penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang diduga dilakukan oleh Surya Darma Ali antara lain dengan memanfaatkan dana setoran awal haji (Santoso, 2014). Bukan hanya pada tahun tersebut Kementerian Agama di sorot oleh masyarakat luas, namun pada tahun 2016 Kementerian Agama kembali disorot, hal ini terkait dengan pelayanan pada sistem manajemen haji. Berbagai artikel mengatakan bahwa pengelolaan sistem manajemen haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia masih sangat kurang, hal ini terkait dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin “Manajemen haji kita masih bermasalah, meskipun sudah ada perbaikan”. paparnya (Prabowo, 2016).

Salah satu topik yang sangat krusial pada manajemen haji di Kementrian Agama sejak dulu dan masih berlangsung hingga sekarang adalah masalah daftar tunggu (*waiting list*) haji. Kabupaten Bulukumba, merupakan salah satu kota di Sulawesi Selatan yang memiliki cukup banyak daftar tunggu calon jamaah haji, salah satu artikel mengatakan “calon jamaah Haji di Bulukumba yang mendaftar tahun ini baru berangkat pada tahun 2037, sehari CJH yang mendaftar sekitar 10-12 orang (awal, 2016). Untuk tahun 2017 jumlah pendaftar haji di Kabupaten Bulukumba mencapai 10.200 hingga masa tunggu

sampai dengan tahun 2037 atau sekitar 20 tahun lamanya, salah satu situs merilis urutan daftar tunggu untuk setiap kabupaten di Sulawesi Selatan dengan urutan berdasarkan jumlah daftar tunggu seperti yang digambarkan pada table dibawah ini:

Tabel 1.1

Data Daftar Tunggu Haji, Kuota dan Tahun Berangkat

No.	Daerah	Kuota	Jemaah Pendaftar (Calon Jamaah Haji)	Sampai dengan Tahun
1	Kab. Wajo	403	11.238	2042
2	Kab. Bantaeng	183	4.855	2040
3	Kab. Sidrap	251	6.397	2039
4	Kab. Pinrang	356	8.525	2038
5	Kab. Bulukumba	405	10.200	2037
6	Kab. Bone	745	17.160	2037
7	Kab. Maros	310	6.891	2037
8	Kab. Gowa	599	12.781	2036
9	Kota Makassar	1.132	23.608	2036
10	Kota Pare-Pare	121	2.461	2035
11	Kab. Jenepono	341	6.859	2035
12	Kab. Takalar	261	4.765	2033
13	Kab. Pangkep	301	5.441	2033
14	Kab. Barru	170	2.954	2032
15	Kab. Sinjai	232	3.700	2031
16	Kab. Luwu Timur	155	2.487	2031
17	Kab. Tana Toraja	35	470	2028
18	Kab. Luwu Utara	228	2.942	2028
19	Kab. Palopo	108	1.366	2028
20	Kab. Luwu	271	3.296	2027
21	Kab. Enrekang	186	2.221	2027
22	Kab. Selayar	114	1.147	2025

Sumber:sketsanews.com

Data daftar tunggu (*waiting list*) tersebut menjelaskan secara rinci dan menunjukkan bahwa Bulukumba menempati urutan ke 5 bersama dengan tiga kota lainnya, saat ini wilayah Bulukumba memiliki 10.200 calon jamaah haji yang sudah melakukan pendaftaran awal (Sketsa news, 2015). Dalam sebuah wawancara dengan media cetak lokal, Kasi Humas Kemenag Bulukumba mewakili kasi penyelenggaraan haji dan umroh kemenag Bulukumba, menyebutkan Jumlah Pendaftar calon haji di Bulukumba tiap tahun rata-rata sekitar 3.500 orang (rahmatullah, 2017).

Haji merupakan salah satu dari kelima aspek rukun Islam, yang mana tidak sempurna Islam seseorang yang mampu jika tidak menunaikan ibadah haji. Haji pada hakekatnya merupakan aktifitas suci yang pelaksanaannya diwajibkan oleh Allah kepada seluruh umat Islam yang telah mencapai *istitho'ah* (mampu), disebut rangkaian suci karena seluruh rangkaian kegiatannya adalah ibadah (Syariati, 2000: 1), dalam (Munawaroh;2015) dan Ibadah Haji merupakan sebuah ibadah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah r.a., ia berkata :

“Rasulullah SAW ditanya, Amalan apakah yang paling utama? ‘Beliau menjawab, ‘Beriman Kepada Allah SWT dan Rasulnya.’ Beliau ditanya lagi, ‘kemudian apa? Beliau menjawab, ‘jihad fi sabilillah.’ Kemudian Beliau SAW ditanya lagi, ‘kemudian apa? Beliau menjawab, ‘Haji yang mabrur.’ Muttafaqun ‘alaih.” (HR.Al-Bukhary dan Muslim, Lihat shahih at-Targhiib wat Tarhiib oleh al-Albani 3/3 hadist No. 1093) dalm(At-Tuwajiri, 2012).

Serta sebuah seruan yang dianjurkan oleh Allah SWT, sebagaimana dalam Q.S. Al-Haji ayat 27 yang membahas tentang seruan dalam menunaikan ibadah haji , yang berbunyi:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

Terjemahan :

dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. (Q.S. Al-Hajj ayat 27).

Ayat ini menjelaskan bahwa pentingnya pelaksanaan haji dan wajib bagi setiap muslim yang mampu, sekali seumur hidup. Haji dan umrah itu dituntut agar dilaksanakan karena Allah, namun ditemukan bahwa dari kelima rukun Islam hanya Haji yang digaris bawahi dengan kata lillah (Shihab, 2002).

Mengingat pelaksanaannya bersifat massal dan berlangsung dalam waktu terbatas, penyelenggaraan ibadah haji memerlukan manajemen yang baik agar dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar (fathurahman, 2016). Untuk mencapai apa yang dikatakan manajemen yang baik, aman dan lancar tersebut Kementerian Agama membangun sebuah sistem yang akan membantu kinerja manajemen haji dalam melakukan pelayanan kepada calon jamaah haji (CJH), sistem yang dimaksud adalah sistem yang diberi nama SISKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu). SISKOHAT adalah sistem yang dibangun pertama kali pada tahun 1992 dan dikembangkan kembali pada tahun 2014, SISKOHAT memegang fungsi dalam pendataan calon jamaah haji mulai dari pendaftaran, keberangkatan hingga kepulangan CJH, segala hal yang mengenai keperluan dan kewajiban CJH dikelola dengan baik oleh SISKOHAT.

Sebagai sebuah sistem yang dirancang untuk mempermudah pelayanan calon jamaah haji, SISKOHAT memberikan peranan penting dalam memperlancar segala urusan mengenai dokumen yang diperlukan calon jamaah haji, kendati demikian sampai saat ini SISKOHAT belum bisa mengatasi adanya pembludakan daftar tunggu calon Jamaah haji khususnya di Kementerian Agama Bulukumba. Permasalahan *waiting list* menjadi kendala bagi calon jamaah haji untuk berangkat ke tanah suci, hal ini dikarenakan lamanya waktu tunggu yang dialami oleh calon jamaah haji yang bisa mengakibatkan munculnya masalah dikemudian hari selama waktu tunggu. Bagaimana tidak, pasalnya bisa saja seorang jamaah haji yang saat mendaftar beliau sehat namun karena terlalu lama waktu tunggu yang diberikan memungkinkan calon jamaah haji tersebut meninggal dunia sebelum waktu keberangkatannya (farhana, 2016).

Selain dengan masalah yang tidak terduga muncul polemik dari adanya *waiting list* memungkinkan adanya tindak kecurangan yang bisa terjadi, seseorang akan memanfaatkan peluang untuk melakukan kecurangan. Kecenderungan *fraud* akan terjadi apabila ada oknum yang memanfaatkan calon jamaah haji yang ingin segera berangkat namun belum pada waktunya, dengan memanipulasi data yang diinginkan untuk disegerakan berangkat.

Penerapan ke lima komponen dari pengendalian internal akan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada berbagai tindak kecurangan, penyimpangan, maupun kesulitan yang mungkin terjadi dapat dihindari atau dapat dideteksi untuk diperbaiki. Kecurangan (*fraud*) sendiri sudah ada sejak dulu hingga

sekarang, di Indonesia sendiri mendengar kata *fraud* di sektor publik maupun sektor swasta telah menjadi hal yang sangat umum, *fraud* merupakan sebuah kejahatan karena meliputi berbagai tindakan yang melawan hukum.

Kecurangan merupakan salah satu alasan cikal bakal munculnya tindak korupsi, Korupsi adalah tindakan seorang pejabat atau petugas yang secara tidak sah dan tidak benar, memanfaatkan pekerjaannya atau karakternya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain, dengan melanggar kewajiban dan hak orang lain (Hall Singleton, 2007) dalam (Putri, 2014). Melihat kenyataan bahwa makin besarnya animo masyarakat yang mendaftar haji tiap tahun memberikan makin besar peluang bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindak kecurangan.

Guna menghindari kecemasan yang ada dalam masyarakat diperlukan pengendalian internal yang efektif yang mampu memberikan pengawasan dan pengamanan, Menurut *American Institute of Certified Public Accountants* dalam buku (Bambang Hartadi:1999) dalam (putri, 2014) memberikan pengertian mengenai Sistem Pengendalian Internal dalam perusahaan yaitu meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan.

Kecurangan (*fraud*) bisa berlangsung lama serta melekat pada seseorang karena kurangnya rasa tanggungjawab yang diemban oleh setiap individu, sehingga

rasa ingin menguntungkan diri sendiri makin meningkat. Pentingnya sebuah pengendalian internal dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-Hasyr 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT, senantiasa memberikan perintah agar selalu mengawasi segala tindakan yang dilakukan hari ini, karena akan berdampak pada dikemudian hari. Terlepas dari sebuah sistem pengendalian internal yang begitu hebat, sebuah bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak yang menjalankan sistem tersebut akan membuat sistem itu menjadi sangat dihormati, pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak pemerintah menjadi sangat penting melebihi dari sistem tersebut, sebuah organisasi baik pemerintah maupun swasta tidak akan berhasil tanpa adanya sebuah transparansi yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan laporan.

Seperti halnya yang dijelaskan Scott (1997) dalam (setiawan, 2012) bahwa kelanggaran suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan untuk menciptakan informasi yang terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Penerapan sikap atau konsep pertanggungjawaban sangat bermanfaat

untuk menilai kecenderungan terjadinya penipuan, kecurangan (*fraud*) atau bahkan yang lebih serius sebuah tindak korupsi, Klitgaard berpendapat bahwa salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi adalah dengan memperbaiki sistem yang korup yakni dengan mengatur masalah monopoli, diskresi dan akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki arti pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan, sebuah konsep yang mengharuskan seseorang tidak hanya sekedar memikirkan diri sendiri namun juga harus berpikir bahwa ada amanah yang diemban dalam tugas yang mereka kerjakan, haji adalah sebuah perintah yang diwajibkan Allah swt. Artinya semua yang berhubungan dengan kegiatan haji harus sesuai dengan syariat Islam, atau yang sesuai dengan pertanggungjawaban yang sewajarnya yaitu terhadap Allah, Manusia, dan Alam (trilogi akuntabilitas) (Husain dan Abdullah, 2015). Sehingga jelas adanya bahwa akuntabilitas adalah hal yang sangat berpengaruh dalam menilai tindak kecurangan, pandangan lain dalam sebuah penelitian yang dilakukan Adefi la and Adeoti (2006) menemukan bahwa akuntabilitas merupakan metode yang paling baik untuk mencegah *fraud*. Dalam (Purwantini). Dari adanya masalah tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengendalian Internal Dan Trilogi Akuntabilitas Untuk Mencegah Terjadinya Fraud Pada Sistem Manajemen Haji”

B. Rumusan Masalah

Sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas terlaksananya kewajiban masyarakat dalam melaksanakan Rukun Islam yang kelima, menjadikan Kementerian Agama sangat diharapkan agar bisa menjadi tempat bagi masyarakat agar terlaksananya kewajiban tersebut, pelayanan haji yang diharapkan oleh masyarakat kepada Kementerian Agama sangat tinggi.

Kemeneterian Agama harus Mampu membangun kepercayaan dari Masyarakat kembali dengan menerapkan konsep Akuntabilitas. Akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban atas apa yang dikelola dengan performa pengelolaannya. Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas kepada Tuhan, manusia, dan alam (Triyuwono,2006a). Bentuk akuntabilitas semacam ini berfungsi sebagai tali pengikat agar selalu terhubung dengan nilai-nilai sunnatullah yang tercermin dalam nilai yang penuh dengan amanah yaitu nilai kejujuran.

Begitu besarnya polemik yang di timbulkan oleh adanya *waiting list* mengharuskan Kemenag Bulukumba ekstra bekerja keras agar polemik adanya *waiting list* bisa diatasi, pemerapan Komponen dari pengendalian internal memungkinkan pencegahan kecurangan yang bisa saja terjadi akibat adanya daftar tunggu yang begitu besar tersebut bisa diatasi.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, peneliti mengangkat rumusan masalah

1. Bagaimana Pengendalian Internal Mencegah Kecenderungan *Fraud* Pada Manajemen Haji Di Kementerian Agama Bulukumba?
2. Bagaimana Triologi Akuntabilitas Mencegah Kecenderungan *Fraud* Pada Manajemen Haji Di Kementerian Agama Bulukumba ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengendalian Internal Mencegah Kecenderungan *Fraud* Pada Manajemen Haji Di Kementerian Agama Bulukumba
2. Untuk Mengetahui Triologi Akuntabilitas Mencegah Kecenderungan *Fraud* Pada Manajemen Haji Di Kementerian Agama Bulukumba

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana fenomena yang ada terkait dengan tindakan diluar kaidah islam, dengan teori dari Prof. Iwan Triyuwono (2006) mengenai *Shariah Enterprise Theory* (SET). *Enterprise theory*, seperti yang dimaksudkan oleh beberapa peneliti lain, merupakan teori yang mengakui adanya pertanggung jawaban bukan hanya kepada pemilik entitas saja melainkan kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas cakupannya. Salah satu penyebab demikian karena kekuasaan penuh bukan lagi oleh kendali penuh *shareholders* melainkan kepada banyak pihak yang juga memilki kepentingan atas *sustainable* perusahaan. Selain itu,

Enterprise theory menjelaskan bahwa akuntansi harus melayani bukan saja pemilik perusahaan, tetapi juga masyarakat.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan secara praktis bermanfaat pada tiga hal:

- (1) Menjadi bahan pertimbangan dan masukan terhadap kebijakan yang akan diambil Kemenag dalam upaya pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji. Secara khusus penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam rangka perbaikan dan pengembangan manajemen pelayanan haji di Indonesia; (2) Memberikan pelayanan kepada calon jamaah haji yang lebih baik, profesional dan memuaskan calon jamaah dalam bentuk rekomendasi kepada Menteri Agama RI; dan (3) Menambah referensi dan pengetahuan tentang manajemen pelayanan haji di Indonesia serta kepada mereka yang berkepentingan terhadap permasalahan ini

E. Kajian Pustaka

Tabel 1.2
Kajian Pustaka

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Saddan Husain dan Wahyuddin Abdullah	Metafora Amanah Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Sebagai Penopang Asset Perbankan Syariah Ditinjau Dari Aspek Trilogi Akuntabilitas	Hasil penelitian menunjukkan adanya penerapan prinsip amanah dalam pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang signifikan. Dengan penerapan prinsip amanah yang menggunakan aspek trilogi akuntabilitas (Tuhan, manusia, dan alam) dapat menopang pertumbuhan asset yang dialokasikan pada asset kategori pembiayaan. Amanah menjadi landasan terpenting dalam pengembangan pengelolaan dana
2	Zubaedi	Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern)	Penelitian ini berupaya mengungkap sisi-sisi manajemen pelaksanaan haji, dan idealnya proses pelaksanaan haji dikatakan sukses, jika memenuhi kesuksesan dari segi keamanan, pelayanan petugas, maupun kesehatan jamaah, tidak ada tumpang tindih tentang pembagian tugas antara regulator, operator dan evaluator.

3	Nida Farhanah	Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia	Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, terjadinya daftar tunggu (waiting list) haji yang berkepanjangan disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: Faktor penyebab terjadinya daftar tunggu dalam aspek yuridis yakni belum adanya landasan yuridis yang kuat terkait dengan kebijakan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah. Jikapun ada, pemerintah belum sepenuhnya menjalankan kebijakan tersebut dengan tegas.
4	Vani Adelin dan Eka Fauzihardani	Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan pada Aturan Akuntansi dan Kecenderungan Kecurangan Terhadap Perilaku Tidak Etis	Hasil penelitian menemukan bukti -Efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, artinya semakin efektif pengendalian internal perusahaan, semakin rendahnya kecenderungan kecurangan akuntansi perusahaan -Ketaatan pada aturan akuntansi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, artinya semakin perusahaan taat pada aturan akuntansi, semakin rendahnya kecenderungan kecurangan akuntansi pada suatu perusahaan.

5	Siti Amerieska	Pengembangan Model Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Berbasis Shariate Enterprise Theory	<p>Akuntabilitas merupakan pondasi utama dalam memelihara kepercayaan stakeholder, karena tanpa adanya akuntabilitas keberadaan suatu organisasi ataupun komunitas akan dapat terancam. Begitu pentingnya suatu organisasi dalam memelihara akuntabilitasnya, untuk itu perlunya organisasi mengkaji dengan seksama bentuk-bentuk akuntabilitas yang dihasilkan untuk stakeholdernya. Bentuk-bentuk akuntabilitas dapat dikaji dalam berbagai dimensi hubungan akuntabilitas. Dalam SET (Shari'ate Enterprise Theory) dikenal trilogi dimensi hubungan akuntabilitas yang mengacu kepada Tuhan sebagai pusat dari akuntabilitas, akuntabilitas kedua adalah manusia kepada manusia yang mana masih dikategorikan dalam dua bentuk (direct dan indirect stakeholder) dan yang terakhir adalah alam, maka dari itu SET akan lebih sesuai untuk dijadikan alat analisis untuk memahami praktik akuntabilitas</p>
---	----------------	---	---

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Stewardship Theory*

Teori *stewardship* memandang manajemen sebagai satuan yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun kepentingan *stakeholder*. Konsep inti dari *stewardship* adalah kepercayaan yang dibangun secara bersama untuk mempertahankan eksistensi entitas. Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *prinsipal*, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya.

Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada *principalnya*. Jelas dengan yang diungkapkan *Donaldson* dan *Davis* bahwa bagaimana sebuah entitas mencapai suatu kinerja yang dicitakan adalah dengan tindakan yang efektif dari para eksekutif. Dalam artian membangun entitas itu harus berawal dari internal entitas kemudian menuju kepada pihak eksternal. Dalam teori ini juga mencoba dikembangkan dari sifat dasar

manusia yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat serta memiliki integritas apa yang telah ia perbuat. Dengan demikian konflik yang sering terjadi dalam *agency theory* akan coba untuk diminimalisir dengan adanya saling kepercayaan yang tertanam. Dalam banyak hal dalam suatu entitas kepercayaan sangat dibutuhkan untuk membentuk tanggung jawab yang baik. Tak terlepas dalam pengelolaan asset dalam entitas sangat dibutuhkan unsur kepercayaan serta tanggung jawab. Asset yang jika dikelola tanpa landasan dan sikap yang bertanggung jawab maka akan memudahkan dalam penyelewengan yang dikenal dengan kata *corruption* (Husain dan Wahyuddin, 2015).

B. *Shariah Enterprise Theory*

Shariah enterprise theory merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang *transcendental* dan lebih humanis (Meilani dkk, 2015). Artinya teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok stakeholders yang lebih luas. Menurut (Meilani dkk, 2014) Menurut Triuwono akuntansi syariah tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan, tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada stakeholders dan Tuhan. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders pada prinsipnya adalah amanah dari Allah SWT yang di dalamnya melekat tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah,) (Hasanah, 2015). *Shariah Enterprise Theory* menurut Slamet menjelaskan

bahwa aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah SWT yang di dalamnya melekat tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah (Hasana, 2015). Dari sudut pandang teori syariah *Shariah enterprise theory* memiliki pandangan dalam distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung atau partisipan yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan (pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah), tetapi juga terhadap pihak lain yang tidak terkait secara langsung terhadap operasi perusahaan.

Cakupan akuntansi dalam *shariah enterprise theory* tidak terbatas pada peristiwa atau kejadian yang bersifat *resiprocal* antara pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses pencapaian laba, tetapi juga pihak lain yang tidak terkait langsung (Jafar, 2012). Penerapan prinsip *shariah enterprise theory* pada perbankan syariah akan membuat kinerja bank lebih sehat, dikarenakan manajemen akan mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Perbankan syariah juga akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat meminimalisir tindak kecurangan yang mungkin dilakukan.

Shariah Enterprise Theory tidak mendudukan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu sebagaimana dipahami oleh *antroposentrisme*. Tapi sebaliknya,

Shariah Enterprise Theory menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakilNya (*khalituLlah fil ardh*), sebagai perpanjangan tangan yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. Artinya sebagai *khalifatullah fil ardh* manusia memiliki misi mulia yaitu menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan (materi dan nonmateri) bagi seluruh manusia dan alam semesta, untuk mempermudah tugas ini manusia dapat menciptakan organisasi (organisasi profit atau organisasi nonprofit) yang digunakan sebagai instrumen dalam mengemban tugas tersebut sehingga organisasi diharuskan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada Allah secara vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam (Kalbarini, 2014).

C. Pengendalian Internal

1. Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan hal yang sangat mendasar dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Setiap perusahaan harus melakukan pengendalian agar perusahaan itu tetap bertahan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus memahami dan memastikan bahwa pengendalian internalnya berjalan dengan baik. Adapun penelitian yang menyatakan bahwa pengendalian internal adalah suatu hal yang memegang peran penting dalam auditing. Untuk itu perlu diketahui definisi tentang pengendalian internal tersebut. Pengendalian Internal adalah kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan (*assurance*) yang memadai bahwa tujuan tertentu satuan usaha akan dicapai, Halim (dalam Astuty 2002).

Pengendalian merupakan tanggapan terhadap suatu ancaman pengendalian yang merupakan jawaban terhadap ancaman. Oleh karena itu, langkah pertama bagi manajemen, TCWG (*those charge with governance*) maupun auditor, ketika mengevaluasi rancangan pengendalian adalah tentukan resiko apa yang perlu ditangkal atau dimitigasi. Langkah kedua bagi manajemen, TCWG, dan auditor adalah pastikan bahwa sistem pengendalian yang dibangun, memang menangkal risiko tersebut.

Struktur pengendalian internal merupakan dasar dari suatu proses evaluasi suatu instrumen terhadap pengendalian risiko, Baraldi (dalam Maharani 2013). Struktur pengendalian internal dalam berbagai organisasi merupakan sebuah pilar untuk mengukur efisiensi dan efektivitas dari sistem akuntansi, Olatunji (dalam Maharani 2013), dan dapat digunakan juga untuk mengetahui konsekuensi yang bisa terwujud dalam suatu kasus yang terkait dengan risiko yang terjadi.

2. Tujuan Pengendalian Internal

Pada pelaksanaannya, pengendalian internal harus memiliki tujuan yang jelas agar dapat berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Kehadirannya akan memberikan tata kelola yang baik dalam mencapai tujuan tersebut. Pengendalian internal yang terdapat dalam perusahaan tidak hanya mencakup kegiatan akuntansi dan keuangan saja tetapi meliputi segala aspek kegiatan perusahaan. Pengendalian internal dapat digunakan untuk: Menjaga keamanan harta milik perusahaan, memberikan keyakinan bahwa laporan yang disampaikan kepada pimpinan adalah benar, meningkatkan efisiensi usaha dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan telah dijalankan dengan baik. Dengan pengendalian internal yang baik, terjadinya *fraud* dan pemborosan dapat dideteksi

dan ditanggulangi secara dini sehingga kerugian perusahaan dapat dihindari. Adapun menurut Arens dkk (dalam Nugroho 2012) yang menyatakan bahwa ada tiga tujuan umum dari sistem pengendalian internal antara lain

a. Keandalan laporan keuangan

Manajemen memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan serta memiliki tanggung hukum maupun profesional untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar dan sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan.

b. Efisiensi dan efektifitas kegiatan operasi

Adanya pengendalian internal dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Adanya akurasi atas informasi keuangan dan *non* keuangan mengenai kegiatan operasi perusahaan akan sangat berguna dalam pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan.

c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan

d. Perusahaan serta organisasi diharuskan mematuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

3. **Komponen Pengendalian Internal**

Terdapat beberapa komponen dari Pengendalian internal yang berkorelasi dengan baik dalam menjalankan fungsinya, Arens dkk. (dalam Nugroho 2012).

a. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan dasar bagi pengendalian internal yang efektif. Ia memberikan disiplin dan struktur bagi entitas, ia menjadi kompas bagi entitas, membuat karyawan sadar akan pengendalian (*control consciousness*) dalam organisasi itu. Lingkungan pengendalian berurusan dengan fungsi pengelolaan

(*management*) dan pengawasan (*governance*) di tingkat tertinggi dalam entitas itu. Ia juga mengatur sikap, perilaku, kesadaran berpengendalian.

b. Penilaian risiko

Laporan keuangan penilaian risiko merupakan proses identifikasi dan analisis manajemen terhadap risiko-risiko yang relevan terhadap penyusunan laporan keuangan. Sementara itu manajemen melakukan penilaian risiko sebagai suatu bagian dalam perancangan dan pelaksanaan Pengendalian Intern untuk meminimalisasi kesalahan dan kecurangan.

Istilah *risk assessment* atau penilaian resiko dapat dilihat dari sisi entitas dan auditor. Entitas memiliki risiko dari sudut pandang ancaman terhadap pencapaian tujuan entitas, diantaranya, ialah menghasilkan laporan keuangan yang bebas dari salah saji yang material. Untuk itulah entitas wajib merancang, mengimplementasikan dan memelihara pengendalian internal. Di pihak lain, auditor menilai risiko sebagai bagian dari proses auditnya. Dalam pembahasan komponen kedua dari pengendalian internal ini, kita melihat persinggungan antara kepentingan entitas dan auditor.

Jika proses penilaian risiko pada entitas yang bersangkutan (disingkat PPRE) sudah sesuai dengan situasi yang dihadapi entitas itu, maka PPRE itu mendukung upaya auditor untuk menilai seberapa besarnya risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan yang diauditnya. PPRE pada umumnya berurusan dengan hal-hal berikut:

1. Perubahan dalam lingkungan operasi entitas.
2. Pejabat atau karyawan senior yang baru bergabung dengan entitas.
3. Sistem (misalnya sistem informasi) yang baru atau yang mengalami perubahan besar-besaran.

4. Pertumbuhan yang cepat.
5. Teknologi baru
6. Model bisnis, produk atau kegiatan baru.
7. Restrukturisasi korporasi (termasuk akuisisi dan divestasi).
8. Perluasan kegiatan di luar negeri.
9. Terbitnya pernyataan akuntansi (*accounting pronouncements*) yang baru.

Dalam entitas yang lebih kecil, PPRE-nya lebih informal. Auditor membahas dengan manajemen, bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko bisnis dan kemudian menanganinya (tindakan apa yang selanjutnya diambil).

c. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu untuk meyakinkan bahwa tindakan yang penting telah dilakukan untuk mengatasi risiko dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun bentuk aktivitas pengendalian yang perlu dilakukan oleh organisasi antara lain: Pemisahan tugas yang memadai, Otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas, Dokumentasi dan catatan yang memadai, Pengendalian fisik atas aset dan catatan-catatan serta Pengecekan terhadap pekerjaan secara independen.

d. Informasi dan komunikasi

Tujuan dari sistem informasi dan komunikasi suatu entitas adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi-transaksi yang terjadi sehingga akuntabilitas terhadap aset-aset sebuah organisasi dapat terjaga dengan baik.

e. Pengawasan

Aktivitas pengawasan berkaitan dengan penilaian yang berjalan atau penilaian berkala atas kualitas Pengendalian Intern oleh manajemen untuk menentukan bahwa

pengendalian dijalankan sesuai dengan tujuannya dan dimodifikasi jika diperlukan atau terjadi perubahan kondisi.

4. Jenis Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal dapat dikelompokkan beberapa kategori berikut:

1. Pengendalian Administratif

Pengendalian administratif meliputi struktur organisasi dan prosedur-prosedur dan catatan-catatan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dengan pengesahan transaksi-transaksi oleh manajemen. Pengesahan tersebut merupakan fungsi manajemen yang secara langsung dengan tanggung jawab untuk mencapai tujuan perusahaan dan merupakan titik awal untuk menyusun pengawasan akuntansi atas transaksi-transaksi.

2. Pengendalian Akuntansi

Pengendalian akuntansi meliputi struktur organisasi, prosedur-prosedur dan catatan-catatan yang berkaitan dengan pengamanan aset dan dipercayainya catatan finansial, dan konsekuensinya, serta berkaitan dengan rencana organisasi, prosedur, catatan untuk menjamin pengamanan harta, dapat diandalkannya laporan keuangan, dan adanya keyakinan bahwa:

- a. Setiap transaksi dilaksanakan sesuai otorisasi yang berwenang.

Setiap transaksi dicatat untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum, maupun dalam rangka untuk akuntabilitas kepengurusan perusahaan.

- b. Akses terhadap asset hanya sesuai dengan otorisasi yang ada.

D. Trilogi Akuntabilitas

Secara global, akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban yang dimiliki oleh seseorang. Telah sering disebutkan sebelumnya bahwa pada dasarnya suatu entitas bukan hanya bertanggung jawab pada manusia tetapi juga bertanggung jawab pada Allah, manusia, dan alam. Inilah ketiga komponen yang akan menjadi sebagai fondasi pendirian trilogi akuntabilitas. Menurut Kholmi, filosofi "trilogi akuntabilitas". Yang dimaksud disini adalah tiga hal pokok yang saling berhubungan dan menguatkan eksistensinya masing-masing dalam konsep akuntabilitas. Tiga hal pokok tersebut adalah pemberi amanah (Allah), penerima amanah (manusia itu sendiri), serta apa yang diamanahkan (alam). Dalam trilogi Akuntabilitas Allah ditempatkan sebagai manajemen puncak atau pertanggung jawaban paling utama, hal ini dikarenakan Dia-lah yang mengadakan semua yang akan di pertanggung jawabkan. Trilogi akuntabilitas dapat menjadi landasan yang tepat untuk perwujudan dalam sebuah pertanggungjawaban secara syariah. Untuk mewujudkannya diperlukan sebuah simbolik yang dapat memberikan gambaran kepada entitas. Ilustrasi yang tampak dapat memperlihatkan keterkaitan yang jelas dalam sebuah hubungan. Menurut Kholmi, Hubungan Allah, manusia, dan alam dalam filosofi trilogi akuntabilitas dapat diilustrasikan pada Gambar 2.1 berikut ini (Husain dan Wahyuddin, 2015).

Gambar 2.1

Trilogi Akuntabilitas



Merujuk pada gambar tersebut memandang bahwa akuntabilitas tertinggi adalah Allah, atau dalam ilmu filsafat Allah disebut sebagai kausa prima, penyebab dari segalanya. Berikut akan jelaskan lebih dalam mengenai ketiga pertanggungjawaban dari suatu entitas. Pertama, akuntabilitas kepada Allah SWT, sebagai kausa prima. Allah yang dipercaya oleh umat Islam sebagai raja atas segala raja, maka disana jualah tempatnya untuk mempertanggung jawabkan di hari akhir apa yang dilakukan selama hidup dimuka bumi ini.

Allah swt telah menciptakan segala apa yang dibutuhkan oleh umat manusia tinggal bagaimana seorang manusia mampu merawat dan menjaga apa yang telah dianugerahkan kepadanya. Amanah yang diemban oleh setiap manusia telah ada sejak lahir, yaitu sebagai *khalifatullah fil ardh* yaitu sebagai rahmat untuk semua makhluk yang diciptakan Allah dimuka bumi ini. Tidak hanya itu kekhalifaan manusia juga tidak lepas begitu saja tetapi Allah akan selalu bersama semua makhluknya. Oleh

karena itu segala yang diperbuat oleh manusia Allah Maha Tahu segalanya. Akuntabilitas yang mengarah kepada Allah SWT sebagai kausa prima menjadi hal yang paling utama dari segalanya. Karna tujuan dari penciptaan manusia tiada lain adalah untuk membaktikan diri pada pencipta-Nya. Allah menciptakan manusia tidaklah dengan palsu dan sia-sia (Q.S. Shaad ayat 27).

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

Terjemahan:

dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. (Q.S. AsShaad ayat 27).

E. Fraud

Istilah *Fraud* memang masih terdengar asing ditelinga kita. Namun dalam konteks dunia akuntansi forensik dan audit investigatif, *Fraud* adalah sasaran operasi utamanya. *Fraud* atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan kecurangan adalah objek utama yang diperangi dalam akuntansi forensik dan dibuktikan dalam audit investigatif. *Fraud* atau kecurangan adalah berbagai macam cara kecerdikan manusia yang direncanakan dan dilakukan secara individual maupun berkelompok untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dari pihak lain dengan cara yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan kata lain, kecurangan adalah penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang lain.

Suatu kekeliruan atau penggambaran yang salah dari fakta material dalam penyajian fakta pembukuan dan akhirnya dalam laporan keuangan. Kecurangan akuntansi ini dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu kecurangan laporan dan kecurangan transaksi. Kecurangan laporan mencakup kesalahan pelaporan yang disengaja sehingga terlihat kondisi keuangan perusahaan lebih baik dari pada kenyataannya dan akhirnya menipu para pemegang saham, investor dan kreditur. (Sayyid, 2014). Amin wijaya (2011a) dalam (Rini, 2012), menjelaskan kecurangan (*fraud*) mengacu pada kesalahan penyajian suatu fakta yang material dan dilakukan satu pihak ke pihak lainnya dengan tujuan manipu dan membuat pihak lain merasa aman untuk bergantung pada fakta yang merugikan baginya

F. Manajemen Haji Indonesia

1. Pengertian Manajemen

Secara istilah manajemen terjemahannya dalam bahasa Indonesia, hingga saat ini belum ada keseragaman, berbagai istilah yang dipergunakan seperti: ketatalaksanaan, manajemen, manajemen pengurusan dan lain sebagainya. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda, istilah manajemen mengandung 3 pengertian yaitu 1. Manajemen sebagai suatu proses Istilah manajemen dalam “*Encyclopedia of the social sciences*” dikatakan bahwa suatu proses yang pelaksanaannya diawasi dan mempunyai tujuan tertentu. Manajemen menurut Hai Mann adalah suatu fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen menurut George R. Terry mengatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan

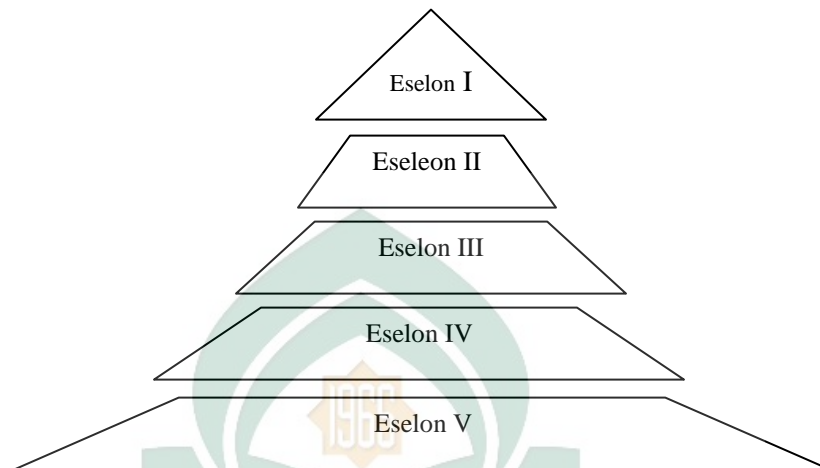
yang diterapkan terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain. Berdasarkan ketiga definisi manajemen tersebut bisa diambil 3 pokok penting yaitu: adanya tujuan yang hendak dicapai, kegiatan orang lain, kegiatan orang lain tersebut harus dibimbing dan diawasi. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan Aktivitas manajemen. Segenap orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dalam suatu badan tertentu disebut manajemen. Dalam arti singular (tunggal) disebut manajer (Purnomo, 2015).

Manajer adalah pejabat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya aktifitas-aktifitas manajemen agar tujuan unit yang dipimpinnya tercapai dengan menggunakan bantuan orang lain. Manajemen adalah suatu seni atau suatu ilmu. Chester I Barnard mengakui bahwa manajemen adalah “seni” dan juga sebagai “ilmu”, demikian pula Henry Fayol, George R. Terry. Jadi manajemen dapat didefinisikan yaitu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

2. Tingkatan Management dalam Pemerintahan Pusat

Dalam pemerintahan pusat, tingkatan manajemen dapat digambarkan pada gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.2
Tingkatan Manajemen



Gambar 2.2 menjelaskan tingkatan manajemen dalam suatu pemerintahan berdasarkan jabatan struktural yang terdiri dari mulai eselon I (satu) sampai dengan non-eselon. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, eselon merupakan tingkatan jabatan struktural. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.

Menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 490 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama, pejabat eselon I (satu) adalah sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal, kepala bagian litbang agama

dan diklat keagamaan. Pejabat eselon II (dua) adalah kepala biro, sekretaris, direktur, inspektur, kepala pusat pada sekretariat jenderal dan kepala badan litbang agama dan diklat keagamaan, kepala kanwil Kem. Agama Propinsi. Pejabat eselon III (tiga) adalah kepala bagian, kepala sub direktorat, kepala bidang, kepala kantor departemen agama kabupaten/kota. Pejabat eselon IV (empat) adalah kepala sub bagian, kepala seksi, kepala KUA. Non-eselon merupakan staf/pegawai yang menjalankan tugas langsung dari pejabat eselon IV.

3. Proses Manajemen Organisasi Pemerintahan

Menurut Sumarsono (2010:25), proses manajemen organisasi pemerintahan pada dasarnya sama dengan organisasi komersial yaitu perencanaan, pengarahan, pengendalian, dan evaluasi penggunaan sumber-sumber yang dikelola. Menurut Kinicki dan Williams (2011:14), proses manajemen yang dikenal juga sebagai fungsi manajemen dibagi menjadi 4 (empat):

- a) *Planning*: didefinisikan sebagai menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Yuwono, Indrajaya, dan Hariyadi (2005:3), perencanaan adalah salah satu tugas penting manajemen di awal siklus operasional.
- b) *Organizing*: didefinisikan sebagai mengatur tugas, orang-orang, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan.

c) *Leading*: didefinisikan sebagai motivasi, pengarahan, dan kemudian mempengaruhi orang-orang untuk bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi

d) *Controlling*: didefinisikan sebagai mengawasi kinerja, membandingkan kinerja dengan tujuan, dan mengambil tindakan koreksi seperti yang dibutuhkan.

4. Pengertian Haji

Kata haji berasal dari akar kata ح ج ه Yang artinya “menuju ke tempat tertentu”, sedangkan secara bahasa haji berarti mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan amalan tertentu meliputi wuquf, tawaf, sa'i dan amalan lainnya. Firman Allah dalam surat Al Imran ayat 97 yang berbunyi:

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Terjemahan :

padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam (QS.Al-Imran, ayat 97)

Dengan demikian dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan, haji adalah pergi ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan beberapa amalan haji, dengan disengaja dan wajib hukumnya bagi yang mampu. Mampu (istito'ah) yang dimaksud di sini adalah mampu melakukan ibadah haji atau umrah.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 ayat (2) menyebutkan pengertian penyelenggara ibadah haji adalah: “Rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji”. Sementara itu dalam Pasal 1 ayat (11) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 396 tahun 2003 tentang perubahan atas keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 371 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyatakan bahwa: “penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji di tanah air dan di Arab Saudi.” Taufik Kamil menyatakan bahwa penyelenggaraan haji adalah : “Suatu sistem kegiatan dengan sub-sub sistemnya yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pendaftaran, pembinaan, kesehatan, keimigrasian, transportasi, akomodasi, penyelenggaraan ibadah haji khusus, dan umrah. Penyelenggaraan haji sesuai dengan tuntutan undang-undang juga mengacu kepada prinsip-prinsip manajemen modern, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan” (Yusni, 2015).

5. Hikmah Ibadah Haji

- a) Nafkahnya disamakan dengan infaq fisabilillah. b) Pahala ibadahnya dilipatgandakan (Madinah di Masjid Nabawi dan di Makkah di Masjidil Haram). c) Do'anya dikabulkan. d) Dosanya diampuni. e) Hatinya bertambah sakinah f) Jaminannya surga.

Ibadah Haji ialah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan beberapa amalan-amalan antara lain : Ihrom, wukuf, Thowaf, Sa'I, Tahallul dan amalan-

amalan lainya dengan syarat dan cara tertentu demi memenuhi panggilan Allah dan mengharap Ridho Allah SWT. Hukum ibadah Haji diwajibkan Allah kepada Ummat manusia yang telah memenuhi syaratsyarat sekali seumur hidup. Selanjutnya yang kedua kali dan seterusnya hukumnya sunnah. dan waktu ibadah haji yaitu pada tanggal 9 sampai 13 Dzulhijjah,

- 1) Syarat haji: a) Islam b) Baliq (Dewasa) c) Aqil (Berakal sehat) d) Merdeka (bukan budak) e) Istitho'ah (mampu).
- 2) Rukun haji : Rukun haji tidak dapat di tinggalkan apabila salah satu rukun tidak dipenuhi, maka hajinya tidak sah adapun rukun haji sebagai berikut: a) Ihrom b) Wukuf di Arofah c) Thowaf Ifadhoh/Thowaf Haji d) Sa'i e) Bertahallul/bercukur f) Tertib
- 3) Wajib haji Wajib haji ini adalah ketentuan yang apabila dilanggar satu ada yang tidak terpenuhi, maka hajinya sah tetapi harus membayar dam (denda) adapun wajib haji sebagai berikut: a) Niat ihrom dari Miqod b) Mabit di Mudzalifah c) Melontar Jumroh Aqobah d) Mabit di Mina e) Melontar 3 Jumroh f) Thowaf wada'.

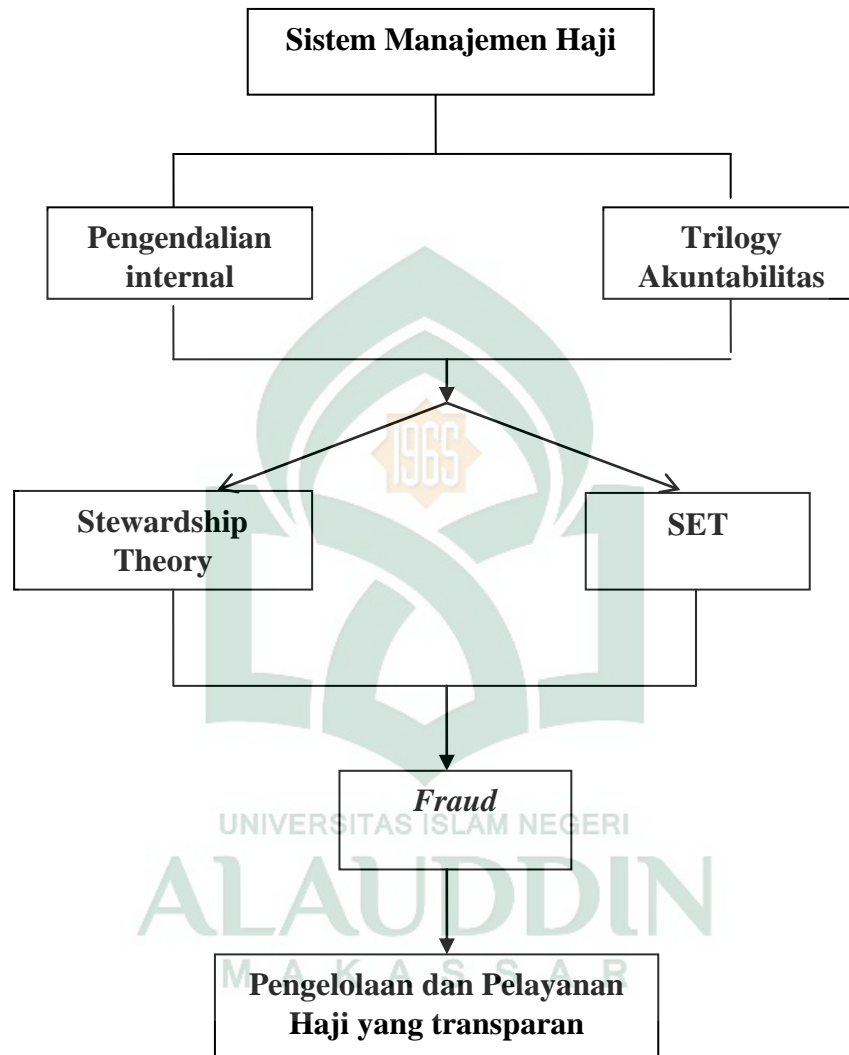
6. Macam-macam Haji

Tamattu' adalah mengerjakan Umrah lebih dahulu, baru mengerjakan Haji. (Cara ini harus membayar Dam Nusuk). b) Ifarad adalah mengerjakan Haji dahulu kemudian baru mengerjakan Umrah. (Cara ini tidak wajib membayar Dam). c) Qiran adalah mengerjakan Haji dan Umrah di dalam satu niat dalam satu pekerjaan sekaligus. (Cara ini wajib membayar Dam nusuk).

G. Rerangka Fikir

Penjelasan mengenai landasan teori dan teori-teori yang relevan, serta bagaimana hasil dari penerapan pengendalian internal dan trilogy akuntabilitas dalam manajemen haji, guna mencegah terjadinya fraud, dimulai dari penjelasan dasarnya terlebih dahulu. Dengan adanya penerapan dari pengendalian internal diharapkan sistem manajemen haji yang ada di Kementerian Agama Wilayah Kabupaten Bulukumba bisa lebih optimal dalam segi penanggulangan *fraud* dari pihak internal maupun eksternal, serta dengan penerapan trilogy akuntabilitas, pelayanan manajemen haji bisa meningkat lagi dibandingkan tahun sebelumnya, artinya dengan penerapan dua konsep tersebut kepercayaan masyarakat akan mutu manajemen haji pada Kementerian Agama bisa ditingkatkan dan mencegah berita atau isu-isu yang memberatkan pihak Kemenag sendiri. Secara sederhana, rerangka pikir dapat disajikan melalui gambar berikut.

Gambar 2.3
Rerangka fikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis Dan Lokasi Penelitian*

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dalam penelitian ini diasumsikan sebagai cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pendekatan kualitatif lebih mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir, oleh karena itu urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan (Mulyadi, 2011)

Pendekatan ini sering disebut juga sebagai penelitian naturalistik karena dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*) dan disebut juga sebagai penelitian interpretatif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Fokus pada proses dan bukan pada hasil merupakan jalan yang ditawarkan pada pendekatan ini, sehingga melibatkan konteks permasalahan agar dapat dilihat secara utuh.

Objek dari penelitian ini adalah kantor Kementerian Agama wilayah Bulukumba pada bagian haji dan umrah, serta menilai kinerja manajemen pada bagian tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dimana pendekatan fenomenologis mencoba menjelaskan dan mengungkapkan makna konsep yang alami sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji berdasarkan paradigma interpretif. Pendekatan ini memfokuskan pada sifat subjektif dari *social world* dan berusaha memahaminya dari kerangka berfikir objek yang sedang dipelajarinya. Penelitian yang menggunakan pendekatan interpretatif yang dikemukakan oleh Setyosari yaitu suatu penelitian interpretatif memberikan pertimbangan atau interpretasi secara deskriptif yang ditujukan untuk memahami suatu fenomena dengan menggunakan data yang dikumpulkan melalui berbagai cara, misalnya melalui wawancara, pengamatan dan kajian dokumentasi.

Tujuan adanya penelitian ini dengan menggunakan pendekatan interpretatif ini adalah untuk memahami latar atau pengalaman yang dialami oleh seseorang atau objek, peristiwa yang ada. Serta digunakannya pendekatan ini, dikarenakan :1) pemahaman muncul melalui interaksi dengan informan yang dipilih, 2) bagaimana informan memberikan informasi dengan pengalaman di lapangan, 3) memahami konteks mekanisme manajemen haji (Setyosari, 2013). Selain itu pendekatan interpretif memperbolehkan peneliti untuk terlibat secara subjektif dengan partisipan penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer lebih mengacu pada informasi yang diperoleh langsung dari pengamatan objek

yang diteliti. Adapun informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam bagian haji dan umroh dan Masyarakat yang sudah serta mau melakukan ibadah Haji. Sedangkan untuk data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau dengan kata lain data diperoleh secara tidak langsung melainkan melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Adapun contoh data sekunder yang digunakan adalah studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, membaca dan mempelajari serta memahami literatur referensi yang bersumber dari buku, jurnal, makalah dan sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji guna mendapatkan kejelasan konsep dan landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan dan Internet *searching*. Dilakukan dengan cara mencari sumber referensi atau bahan acuan dalam mendukung kelengkapan referensi penulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik, maka diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapat mampu mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti dengan benar. Dalam tahap pengumpulan data, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan yaitu dengan melakukan survei (wawancara dengan menggunakan alat perekam) terhadap suatu objek secara langsung sebagai informan penelitian. Wawancara yang dilakukan adalah komunikasi secara langsung (tatap muka)

antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan secara lisan dengan responden yang menjawab pertanyaan secara langsung.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data deskriptif sebagai alat untuk menjelaskan peristiwa atau dalam hal ini adalah menjelaskan bagaimana calon jamaah haji bisa menunggu begitu lama untuk berangkat, serta bagaimana pengendalian internal digunakan dan dikembangkan bersama konsep Trilogi Akuntabilitas di dalam manajemen haji guna melihat adanya kemungkinan *fraud* yang bisa terjadi. Dalam metode analisis data ada 3 tahap yang dilakukan, Ketiga hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meninjau langsung pada objek dan sasaran yang diteliti, dengan mewawancarai informan yang diinginkan dalam hal ini pihak yang bertanggung jawab pada pengelolaan haji pada Kementerian Agama wilayah Bulukumba

2. Studi Pustaka

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari literatur referensi dari jurnal, makalah, dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan kejelasan konsep dalam upaya penyusunan landasan teori yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

3. Internet *Searching*

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penelitian yang terkait.

E. Data informan penelitian

No	Informan	keterangan
1	Ibu Dia	Calon jamaah haji di kecamatan kindang
2	Bpk. H.A. Mapparolla	Kepala Kasi Haji dan Umroh Kementerian Agama Bulukumba
3	Bpk. Irfan	Staf bagian informasi dan system Kasi Haji dan Umroh
4	Ibu Indah	Calon jamaah haji di kecamatan caile

F. Instrumen Penelitian

Penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian dengan menggunakan :

1. Kamera
2. Alat tulis,
3. Beberapa referensi jurnal
4. Daftar pertanyaan wawancara
5. Handphone
6. Selain itu juga, penelitian ini dilakukan dengan mengunduh (download) data yang dibutuhkan terkait dengan perusahaan tersebut.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu, proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Hal yang perlu diperhatikan adalah analisis data tidak dapat dipisahkan dari data *collection*. Oleh karena itu, ketika data peneliti mulai terkumpul, analisis data harus segera dilakukan untuk menentukan pengumpulan data berikutnya. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dalam melihat fenomena akuntansi, dengan menggunakan *teory stewardship* dan *teory SET*, agar tujuan yang dicapai dalam pemahaman pencegahan *fraud* oleh pihak manajemen bisa dilakukan. Berdasarkan Model Mikes dan Huberman, proses pengolahan dan analisis dalam penelitian dilakukan melalui tiga tahapan secara berkesinambungan yang meliputi tahap reduksi data (*data reduction*), tahap penyajian data (*data display*), dan tahap penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drwing/verivication*). Langkah analisis yang akan dilakuakn pada penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan. Kegiatan ini dilakukan secara berkeseinambungan sejak awal penelitian hingga akhir pengumpulan data. Proses reduksi data, data yang tidak penting akan dikurangi sehingga data yang dipilih akan diproses ke langkah selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data yang dimaksud adalah menyajiakn data yang sudah direduksi dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk deskriptif. Dalam penyajian data, dilakukan analisis data menggunakan pendekatan yuridis untuk melihat keterkaitan antar variabel berdasarkan data yang terkumpul sehingga kesimpulan yang dirumuskan menjadi akurat dan objektif.

3. Penarikan kesimpulan (*Conclution Drawing*)

Data penelitian dikaitkan pada teori yang digunakan sebelumnya, hal yang perlu diperhatikan adalah kejadian yang ada pada setting penelitian, intrprtasi yang dilakukan dituangkan dalam narasi, gambar dan kutipan-kutipan dari hasil wawancara. Apabila kesimpulan yang ditetapkan sudah didukung oleh data-data yang valid dan akurat sehingga sudah mampu menjawab rumusan masalah pada tahap awal, kesimpulan tersebut sudah dapat diterima.

H. Pengujian Keabsahan Data

Sebagaimana dalam teknik analisis data, bahwa penelitian ini menggunakan data kualitatif, uji keabsahan data untuk mendapatkan nilai kebenaran terhadap penelitian disebut juga uji kredibilitas. Dimana dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan prosedur *trianggulation*, karena penelitian ini menggunakan berbagai sumber data, teori, metode dan investigator secara konsisten sehingga menghasilkan informasi yang akurat. *Triangulation* artinya menggunakan berbagai pendekatan dalam melakukan penelitian. Triangulasi sendiri adalah gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Triangulasi meliputi empat hal yaitu

triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber dan triangulasi teori. Namun penelitian kali ini hanya menggunakan 2 cara, yaitu:

1. Triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda dan menggali kebenaran informasi penelitian melalui sumber lain agar dapat memberikan bukti dan keandalan yang berbeda.
2. Triangulasi teori, hasil akhir dari penelitian ini dari adanya dua teori yang berlainan yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat, penjelasan teori *stewardship* dan teori SET, dalam menyesuaikan data. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil dan sejarah singkat Kementerian Agama Bulukumba

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba, beralamat di Jalan Kenari No. 17, Loka, Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba 92511. Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba mempunyai banyak seksi diantaranya seksi haji dan umrah dan terbentuknya seksi Haji dan Umrah sama dengan latar belakang berdirinya Kementerian. Indonesia merupakan bangsa yang relegius, dapat kita lihat dari kehidupan masyarakatnya maupun dalam kenegaraanya. Di lingkungan masyarakat, terlihat terus meningkat kesemarakkan dan kekhidmatan kegiatan keAgamaan baik dalam bentuk ritual, maupun dalam bentuk sosial keAgamaan. Semangat keAgamaan tersebut, tercermin pula dalam kehidupan bernegara yang dapat dijumpai dalam dokumen-dokumen kenegaraan tentang falsafah negara Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan buku Repelita serta memberi jiwa dan warna pada pidato-pidato kenegaraan.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional semangat keagamaan menjadi lebih kuat dengan ditetapkannya asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai salah satu asas pembangunan. Hal ini berarti bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang

menjadi landasan spiritual, moral dan etika pembangunan. Berdirinya Kementerian Agama pada 3 Januari 1946, sekitar lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan.

Sejarah lahirnya Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba tidak terlepas dengan sejarah lahirnya Kementerian Agama (dulu Departemen Agama) pada umumnya. Kementerian Agama lahir pada tanggal 3 Januari 1946 sekitar lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan atas usulan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP). Adapun pertimbangan yang menjadi latar belakang pembentukan Kementerian Agama pada waktu pertama kali diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor filosofi

Indonesia merupakan bangsa yang menganut bermacam-macam Agama, dan Agama sudah menjadi pedoman kehidupan berAgama seperti menjadi nilai-nilai luhur pancasila. Kementerian Agama dibentuk karena tuntutan pengembangan peri kehidupan berAgama bagi masing-masing pemeluk Agama, untuk mewadahi seluruh Agama bagi rakyat Indonesia.

b. Faktor Historis

Didalam sejarah pertumbuhan masyarakat bangsa Indonesia sudah tercatat dalam kerajaan yang sudah pernah ada di Indonesia sebelum merdeka kehidupan berAgama menjadi perhatian kerajaan, bahkan kerajaan itu sendiri merupakan suatu kerajaan berAgama. Hal ini menyebabkan kenapa pemerintah jajahan Belanda yang sekuler dan Jepang tetap mengurus masalah Agama pada waktu awal kemerdekaan

pengurusan kehidupan berAgama itu terdapat pula berbagai Kementerian. Kementerian Agama dibentuk agar semua urusan Agama diurus dalam suatu Kementerian.

c. Faktor Sosio Politis

Negara Indonesia tumbuh dan berkembang dengan berbagai nilai budaya yang sangat dijiwai oleh Agama. Tatanan kehidupan sosial budaya berlainan dengan nilai-nilai Agama. Pergerakan kebangsaan banyak sekali dimotivasi oleh Agama. Oleh karena itu, kegiatan politik bangsa Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari Agama. Kementerian Agama dibentuk agar menjadikan kekuatan sosial politik.

d. Faktor Yuridis

Pancasila dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa yang menjiwai empat sila lainnya dan UUD 1945 dengan pembukaan dan batang tubuh serta penjelasannya mencerminkan aspek kehidupan berAgama. Dengan Kementerian Agama agar segi-segi tersebut bisa termanifestasi dalam setiap lembaga Negara. Dari latar belakang diatas, terdapat beberapa hal yang membedakan Kementerian Agama dengan Kementerian yang lain. Beberapa konsensus Nasional yang menjadi pertimbangan dan pendukung lahirnya Kementerian Agama diantaranya adalah:

- a) Ditetapkannya Piagam Jakarta menjadi pembukaan UUD 1945.
- b) Sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila yang menjiwai menjadi dasar bagi sila-sila yang lainnya.

Keberadaan Kementerian Agama dalam jajaran pemerintahan Negara RI sejak kabinet RI kedua, yaitu kabinet Syahrir T. bukan tanpa perjuangan. Perjuangan umat Islam dalam melawan penjajahan Belanda yang menganut sistem diskriminasi dibidang Agama. Menumbuhkan keinginan mereka untuk memiliki Kementerian Agama dalam sistem pemerintahan Indonesia. Keinginan itu mulai diusulkan oleh tokoh-tokoh pergerakan Islam pada bulan April 1941 sehubungan dengan memorandum tentang susunan kenegaraan Indonesia berparlemen akan tetapi memorandum tersebut tidak ditanggapi oleh Belanda. Pemerintah militer Jepang menggantikan kekuasaan Belanda tahun 1942, pemerintah Jepang memberi keleluasaan. Dalam pemerintahan jepang dibentuk badan pemerintahan yang mengurus kepentingan islam, di pusat disebut Syumubu, dan di setiap Kabupaten disebut Syumuka, dan salah satu anggotanya adalah Abu Darsiri dari Purwokerto sebagai Syumukoco walaupun pada hakekatnya diarahkan perkembangan hidup keAgamaan di Indonesia supaya terhambat sesuai dengan kepentingan Da'I Toa.

Meletusnya revolusi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka umat beragama yang tidak sedikit andilnya dalam perjuangan kemerdekaan, menyatakan kehendak agar soal-soal keagamaan yang pada zaman penjajahan tidak memperoleh pelayanan semestinya, dapat di urus di Kementerian tersendiri. Tibalah saat-saat yang bersejarah ketika secara kebetulan pada tanggal 24-28 November 1945, digedung Fakultas Kedokteran Salemba Raya Jakarta Selatan diadakan sidang KNIP (Komite Nasional Pusat) yang dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden dan para

menteri serta utusan/anggota-anggota KNIP seluruh Jawa, berkumpul untuk membentuk Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama). (Dokumen lap. Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba Tahun 2017).

2. Visi dan Misi Kementerian Agama

Visi

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antara sesama pemeluk Agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia.

Misi

1. Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman pengalaman dan pelayanan kehidupan berAgama.
2. Meningkatkan penghayatan moral dan etika keAgamaan.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan umat berAgama.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji.
5. Memberdayakan umat berAgama dan lembaga keAgamaan.
6. Memperkokoh kerukunan umat berAgama.
7. Mengembangkan keselarasan pemahaman keAgamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia (Prospektus Kantor Kementerian Agama Kab. Bulukumba Tahun 2017).

3. Tugas dan Fungsi Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba.

a. Tugas

Merencanakan dan melaksanakan pemberian bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang Bimbingan Urusan Haji serta mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

1. Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah
2. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji, pengelolaan keuangan haji, pembinaan jemaah haji dan umrah, serta pengelolaan sistem informasi haji; dan
3. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah (Arsip Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba, 2017).

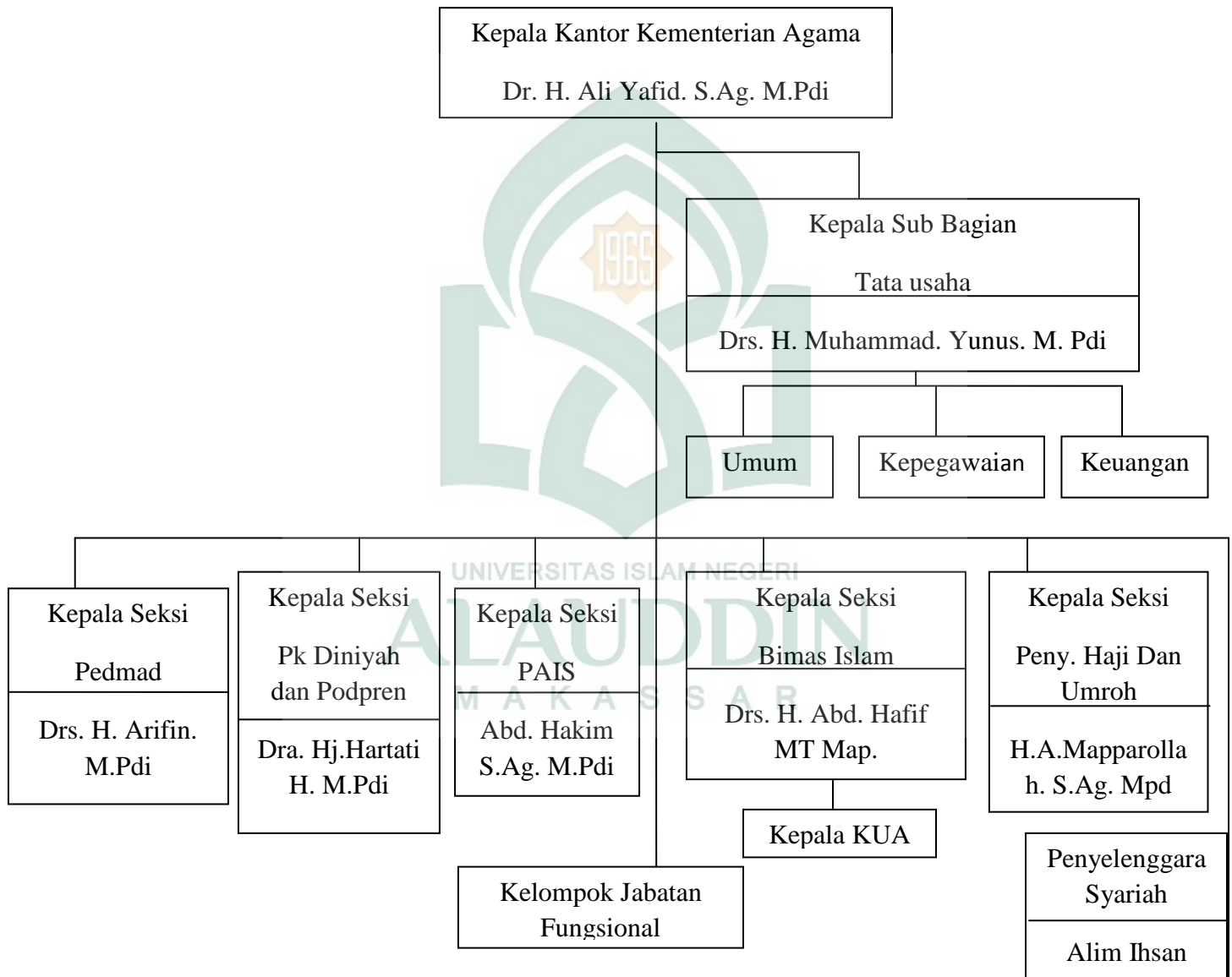
4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan manajemen dalam meperlancar mekanisme suatu perusahaan. Secara umum gambaran struktur organisasi Kementerian Agama

Wilayah Bulukumba, serta Struktur Organisasi untuk Penyelenggara Haji dan Umroh pada Kementerian Agama Wilayah Bulukumba, adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba

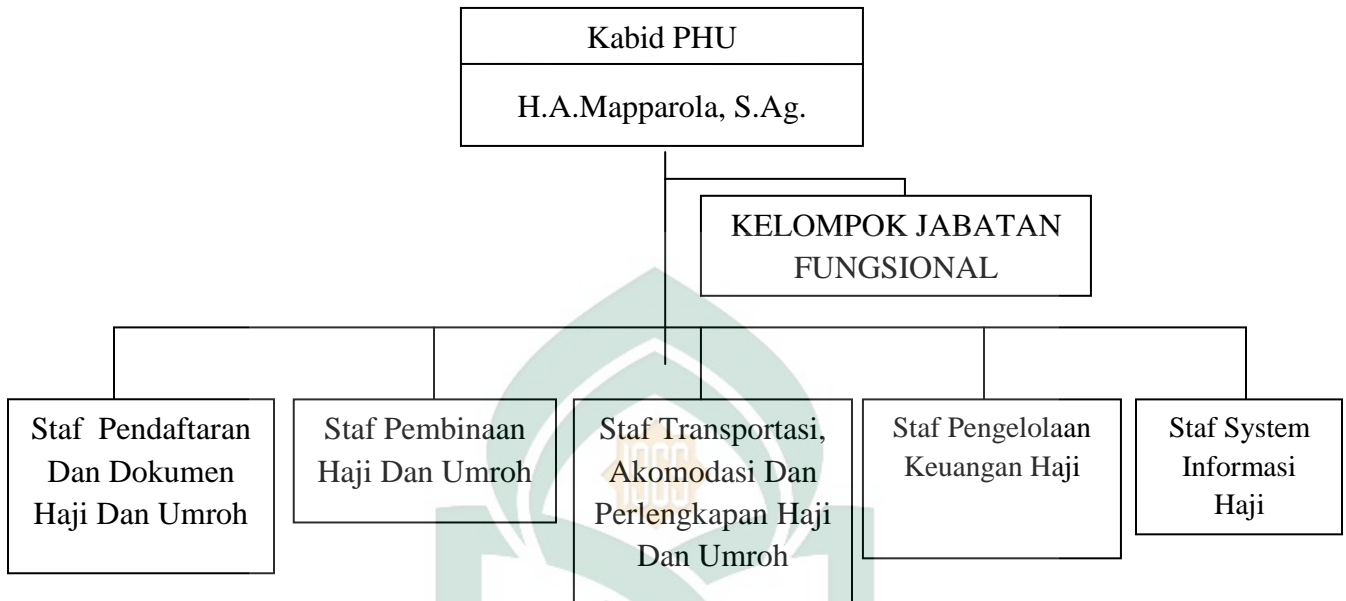
Gambar 4.1



Sumber : (Arsip Kantor Wilayah Kementerian Agama Bulukumba Thn 2017)

Struktur Organisasi Penyelenggara Haji dan Umroh

Gambar 4.2



Sumber : (Arsip Kantor Wilayah Kementerian Agama Bulukumba Thn 2017)

Adapun tugas masing masing seksi adalah sebagai berikut :

a. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji

Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendaftaran dan dokumen haji.

b. Seksi Pembinaan Haji dan Umrah

Seksi Pembinaan Haji dan Umrah melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pembinaan haji dan umrah.

c. Seksi Akomodasi, Transportasi, dan Perlengkapan Haji

Seksi Akomodasi, Transportasi, dan Perlengkapan Haji melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang akomodasi, transportasi, dan perlengkapan haji.

d. **Seksi Pengelolaan Keuangan Haji**

Seksi Pengelolaan Keuangan Haji melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan haji.

e. **Seksi Sistem Informasi Haji**

Seksi Sistem Informasi Haji melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis di bidang sistem informasi haji dan umrah.

B. Manajemen Pelayanan Jama'ah Haji di Kementerian Agama di Kabupaten Bulukumba

Potret penyelenggaraan haji di Kabupaten Bulukumba dimulai dari pendaftaran sampai pada pemulangan jamaah haji ke Kabupaten Bulukumba yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba. Dengan koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Istansi yang terkait dengan penyelenggaraan haji.

Penyelenggaraan haji di Kabupaten Bulukumba dimulai dari:

1. Pendaftaran calon jamaah haji di Kabupaten Bulukumba.

Pendafran calon jamaah haji di Kabupaten Bulukumba tidak dibatasi waktunya selama jam kantor jadi masyarakat bisa melakukan pendaftaran kapanpun.

Bagi calon jamaah haji yang hendak mendaftar sebagai calon jamaah haji harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan ibadah haji bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh jamaah haji sebagai berikut:

a) Beragama Islam

Persyaratan yang pertama yang harus dipenuhi oleh calon jamaah haji ialah beragama Islam, sesuai dengan rukun Islam yang kelima yaitu naik haji bagi orang yang mampu yang dimaksud mampu disini bukan hanya mampu secara materi tapi fisik dan mental.

b) Berdomisili di Indonesia

Adapun persyaratan yang kedua yaitu berdomisili di Indonesia itu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Negara Republik Indonesia.

c) Sehat jasmani dan rohani

Yang ketiga sehat jasmani dan rohani, maksudnya calon jamaah harus sehat jasmani dan rohani karena dalam pelaksanaan haji membutuhkan banyak tenaga pada saat pelaksanaannya.

d) Bagi calon jamaah haji wanita harus diikuti oleh suami atau mahrom yang sah dan tidak dalam keadaan hamil.

Selanjutnya yaitu jamaah haji harus diikuti oleh suami atau mahrom yang sah dan tidak dalam keadaan hamil dikarenakan orang dalam keadaan hamil

tidak bisa melakukan banyak aktivitas atau perjalanan yang jauh dan berdesak-desakan.

- e) Bukti setor Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun yang bersangkutan

Yang terakhir yaitu Bukti setor Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun yang bersangkutan sebagai bukti bahwa calon jamaah haji sudah siap secara keuangan.

Adapun selanjutnya diterangkan oleh salah satu calon jamaah haji di Kementerian Agama Bulukumba.

Waktu mauki daftar nasuruhki datang ke depag, terus disanapi bededikasiki surat apa itu namanya ehh surat pendaftaran haji. Terus nasuruhka juga bawa foto kopi ktp 5 lembar, terus foto kopi kartu keluarga juga. Terus nasuruhka juga bawa foto ukurannya 4x6 sama 3x4, sama dibawaki juga akta kelahiran. Sudahki itu nafotoki disana nasuruhki bayar, nabilangki petugasnya karena nasediakanki jas sama tempat fotonya makanya membayarki.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa calon jamaah haji harus menyiapkan semua data yang diperlukan, Selanjutnya yaitu mengisi SPPH atau formulir dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Haji (pelimpahan dari Kepala Kemenag) dan dicatat dalam buku pendaftaran haji menggunakan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu). Calon jamaah haji yang telah mengisi formulirnya maka akan di input datanya kadalam sistem komputerisasi haji secara terpadu dengan menyertakan formulirnya dengan membawa SPPH yang sudah diisi secara lengkap dan sudah ditandatangani Kepala seksi haji, yang bersangkutan menuju bank syariah yang ia pilih dan membayar 25 juta rupiah sebagai setoran awal. Kemudian calon

jamaah haji tersebut mendapatkan porsi kemudian menyampaikan bukti setoran kembali.

Selanjutnya calon jamaah haji menunggu turunnya informasi pelunasan sambil melengkapi berkas seperti:

- 1) Foto kopi Surat keterangan kesehatan

Foto kopi surat kesehatan ini bisa diperoleh dengan cara memeriksakan diri ke puskesmas setempat yang ada di daerah masing-masing calon jamaah haji. Kartu kesehatan berguna untuk mengontrol kesehatan jamaah haji dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berskala.

- 2) Foto kopi Kartu golongan darah

Kartu golongan darah ini berguna untuk mengetahui golongan darah jamaah haji dan menjadi acuan petugas kesehatan apabila dalam pelaksanaannya jamaah mengalami gangguan kesehatan atau penyakit lainnya yang membutuhkan donor darah atau sebagainya.

- 3) Foto kopi tabungan haji.

Foto kopi tabungan haji sebagai bukti bahwa calon jamaah haji berhak untuk di berangkatkan melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu naik haji bagi orang yang mampu. Setelah memperoleh bukti pelunasan dari BPS (bank penerima setoran), kemudian bukti setoran tersebut diantarkan ke Kemenag dan melakukan Pengambilan foto yang dilakukan petugas haji kemenag.

2. Pembuatan paspor

Sebelum dibuatkan paspor calon jamaah haji mendatangi Kemenag untuk melakukan pembuatan Surat keterangan nama, nama calon jamaah harus terdiri dari 3 kata contoh “Evi Alhudari Arbani” bila nama Jama’ah Haji tidak memiliki 3 kata, maka dapat ditambah nama ayah atau kakek maka akan dibuat surat keterangan nama.

Setelah itu maka dibuatkanlah surat rekomendasi penerbitan paspor jamaah haji yang nantinya akan dibawa oleh pihak penyelenggaraan, setelah beberapa hari ada informasi dari kantor imigran calon jamaah haji mendatangi kantor tersebut untuk melakukan Pengambilan foto dan sidik jari serta tanda tangan. Sedangkan untuk trsanfortasinya ditanggung atau disediakan oleh Kemenag tampah dipunguti biaya.

Paspor yang sudah diterbitkan dan diterapkan cap “Jamaah Haji Indonesia (*Indonesian* Haji)” oleh Imigrasi, kemudian diserahkan kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai domisili. Biaya pembuatan paspor Jama’ah Haji dan petugas haji dibebankan kepada Kementerian Agama. Bagi Jama’ah Haji yang telah memiliki paspor, dapat digunakan apabila masa berlaku paspor tersebut sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak keberangkatan Jama’ah Haji terakhir. (*Sumber: Arsip Kantor Wilayah Kementerian Agama Bulukumba Thn 2017*).

3. Sistem Siskohat

Biodata dalam SPPH dimasukkan kedalam SIKOHAT untuk mendapatkan porsi pemberangkatan. Pembayaran ONH dilakukan di BPSONH (Bank Penerima

Setoran ONH) dengan mengecek terlebih dahulu nomor porsi yang telah ada di SISKOHAT. Selanjutnya calon haji akan menerima tanda bukti setor ONH yang satu kopianya diserahkan kembali ke Kemenag untuk pengurusan dokumen selanjutnya.

Proses pengurusan dokumen dilakukan keKemenag dengan mengelompokkan para calon haji dalam satu daftar nominatif (nominatif tingkat-II) dimana nantinya daftar ini merupakan cikal bakal pembentukan kloter (kelompok terbang). Proses pembentukan nominatif ini dilakukan secara otomatis dengan fasilitas program dari SISKOHAT.

Selanjutnya daftar nominatif tingkat-II (**kabupaten**) akan dikonsolidasikan menjadi daftar nominatif Tingkat-I di kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi. Pembentukan nominatif tingkat-I ini juga dilakukan secara otomatis dengan fasilitas dari SISKOHAT. Berdasarkan nominatif tersebut, maka data-data paspor akan tercetak secara otomatis, untuk dikirim ke Kantor Pusat guna pengurusan Visa. Seluruh paspor yang akan di visa terlebih dahulu diteliti di kantor pusat dengan fasilitas penelitian dari SISKOHAT, dan setelah dikelompokkan dikirim ke KBSA (Kedutaan Besar Saudi Arabia) untuk diberikan visa.

Pada tahap ini monitoring pemisaan dapat dimonitor melalui SISKOHAT, seperti posisi paspor yang telah dikirim ke KBSA, paspor yang telah di visa atau paspor yang bermasalah. Semua paspor yang telah diberikan visanya di konfirmasi melalui SISKOHAT, dan secara otomatis kanwil tingkat-I dapat mencetak SPMA

(Surat Panggilan Masuk Asrama) dari SISKOHAT untuk dikirim ke alamat masing-masing calon haji.

4. Menentukan Pembentukan Rombongan Dan Regu

- a. Pengelompokan bimbingan jamaah haji diatur berdasarkan pertimbangan domisili maksudnya ialah KARU ini diangkat berdasar dengan kekerabatan yang berjumlah 11 orang sedangkan KAROM diangkat berdasar dengan seDesa atau Kecamatan sampai mencukupi sebanyak 45 orang yang terdiri dari 4 regu. Setelah dibentuk ketua rombongan dan ketua regu maka akan dilakukan pembinaan selama tiga hari oleh Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba.
- b. Jamaah haji akan diberangkatkan dalam satu kelompok terbang (kloter) dengan kapasitas pesawat bervariasi yaitu: 325 orang, 360 orang, 405 orang, dan 455 orang. Dalam kloter tersebut terdapat petugas operasional yang menyertai jamaah haji terdiri dari:
 - a) Tim pemandu haji Indonesia (TPHI) sebagai ketua kloter.
 - b) Tim pembimbing ibadah haji Indonesia (TPIHI)
 - c) Tim kesehatan haji Indonesia (TKHI) sebagai pelayan kesehatan
 - d) Ketua rombongan
 - e) Dan ketua regu. (kemenag bulukumba, 2017)

Setelah dibentuk ketua regu dan ketua rombongan maka diberikan pemantapan selama 3 hari. KARU ini diangkat berdasar dengan kekerabatan yang

berjumlah 11 orang sedangkan KAROM diangkat berdasarkan se-desa atau se-kecamatan sampai mencukupi sebanyak 45 orang yang terdiri dari 4 regu

5. Pemberangkatan Jamaah Haji (Dari Kabupten Bulukumba)

Jamaah haji diberangkatkan dengan beberapa bus yang disediakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait. Setelah jamaah sudah berkumpul di Masjid Agung Bulukumba maka tahap selanjutnya jamaah akan di berangkatkan menuju ke Embarkasi Makassar dan dilakukan penyerahan secara resmi oleh Bupati Bulukumba selaku PPIH kepada PPIH provinsi, kemudian PPIH provinsinsi meyerahkan kepada PPIH Arab Saudi dalam penyelenggaraan haji terdapat 3 kepanitian PPIH.

C. *Waiting List* (Daftar Tunggu) dalam Penyelenggaraan Ibada Haji Di Kementerian Agama Bulukumba

Waiting list atau daftar tunggu, adalah salah satu masalah yang dihadapi kementerian agama saat ini, pasalnya tiap tahun daftar tunggu yang ada semakin bertambah. *Waiting list* menjadi polemik yang sangat merisaukan masyarakat, hal ini karena *waiting list* ini calon jamaah haji sampai harus menunggu hingga 25 tahun lamanya, untuk data terakhir saat penelitian ini dilakukan jumlah pendaftar yang ada di Kabupaten Bulukumba sudah mencapai kurang lebih 10.200 calon jamaah haji. Data sebelumnya yang peneliti dapat bahwa jumlah daftar tunggu di Sulawesi Selatan ditempati oleh Kabupaten wajo yang akan berangkat sampai dengan tahun 2042 tahun. Kabupaten Bulukumba sendiri data terakhir yang peneliti dapat berada pada

kisaran sampai dengan tahun 2037. Padahal, ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengenai kewajiban haji yang harus segera dilaksanakan sebagai berikut:

Artinya : “barang siapa hendak melaksanakan haji, hendaklah segera ia lakukan, karena terkadang seseorang itu sakit, binatang (kendaraannya) hilang, dan adanya suatu hajat yang menghalangi” (HR. Ibnu Majah, disahihkan oleh al-Albani).

Dari hadis tersebut jelas dikatakan bahwa hendakla kita mensegerakan untuk menunaikan haji, hal ini karena manusia tidak akan pernah tahu apa yang akan menyimpannya selama dia belum berhaji. Berdasarkan hal tersebut *waiting list* menjadi polemik hal ini dikarenakan daftar tunggu yang selama itu tidak sedikit calon jamaah haji yang gagal berangkat karena telah tutup usia atau karena adanya hajat yang perlu ia lakukan yang mendesak. Adanya daftar tunggu sebenarnya bukan diinginkan oleh Kementerian Agama, Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Informan peneliti tanggal dalam wawancara 10 oktober 2017.

Adanya keputusan OKI tahun 1987 yang menyatakan bahwa untuk setiap negara yang akan masuk tiap tahunnya ke Tanah suci dalam melaksanakan ibadah haji sudah ditetapkan porsi kuotanya untuk tiap Negara. Refresentatif jumlah kuota tiap tahunnya diberikan atas jumlah penduduk Islam tiap negara, selanjutnya pembagian kuota yang diberikan, dibagikan ke tiap Provinsi, dengan pembagian jumlah yang sama yaitu pembagian berdasarkan jumlah penduduk islam. Nah Untuk disini sendiri di Bulukumba dengan jumlah penduduk islam yang dimiliki sebanyak kurang lebih 400 jiwa maka jumlah kuotanya tahun ini sebanyak 400 lebih. Nah dari situlah seseorang bias masuk daftar tunggu atau *waiting list* itu. Adek pikir sendiri jumlah pendaftar yang ada disini itu kira-kira sampai 10.000 ribu orang sedangkan yang diberikan sama kita hanya sekitar kurang lebih 400 kuota. Nah disitulah orang-orang yang tidak masuk dalam pendaftar sampai ke 400 itu akan masuk kedalam *waiting list*.

Berdasarkan wawancara tersebut, ditemukan bahwa *waiting list* terjadi bukan karena kesalahan pihak Kemenag, namun melihat dari cara informan menjelaskan dapat ditangkap bahwa sebenarnya ada sebuah kesalahan yang mengakibatkan daftar tunggu makin panjang, yaitu pihak Kementerian Agama Bulukumba Tidak memberikan pembatasan terhadap calon jamaah haji. Salah satu faktor yang menjadikan adanya *waiting list* adalah dibukanya pendaftaran haji tiap tahunnya, dengan animo masyarakat Kabupaten Bulukumba dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat menjadikan masyarakat makin berlomba untuk melaksanakan rukun islam yang kelima itu.

Selain dari itu banyaknya daftar tunggu diakibatkan pula oleh adanya masyarakat yang melakukan pendaftaran haji untuk kesekian kalinya, artinya ada jamaah haji yang sudah pernah menunaikan haji sebelumnya dan dia ingin melakukannya lagi. Betapa banyak orang yang belum pernah hadir ke Baitullah begitu berharap untuk dapat datang ke sana, meski perjuangan dan pengorbanan yang berat perlu mereka lakukan. Padahal Para ulama sepakat bahwa haji wajib satu kali seumur hidup.

Salah satu konsep yang dimiliki oleh penyelenggaraan Haji adalah adanya sistem *first come first served* sesuai dengan nomor urut porsi yang telah terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama. Ditengah masalah mengenai daftar tunggu tersebut, peneliti menemukan beberapa factor lain yang menjadi alasan adanya *waiting list* tersebut di antaranya karena

perkembangan zaman dan bertambah banyaknya jemaah haji setiap tahun, sementara fasilitas terbatas, maka Pemerintah Arab Saudi menetapkan jatah atau kuota haji untuk setiap Negara (Farhana, 2016). Meski kuota setiap tahunnya ditingkatkan namun pada kenyataanya jumlah pendaftar masih lebih banyak dibandingkan dengan kuota yang diberikan. Sebagai rukun Islam kelima, haji merupakan ibadah yang sangat populer dan begitu digandrungi *elite* hartawan Islam Indonesia. Tingginya animo pengulang haji terkadang sengaja menutup mata untuk memberikan kesempatan terhadap calon jemaah haji yang baru ingin melaksanakan ibadah haji yang pertama kalinya.

Seharusnya jika mereka sudah pernah berhaji, mereka harus memiliki rasa toleransi agar mendahulukan kemaslahatan umum. Namun, mereka justru turut serta antri bertahun-tahun untuk bisa mendapat *seat* kembali karena keterbatasan kuota. Hal yang mengherankan sekaligus memprihatinkan, ternyata dari jutaan orang yang masuk daftar tunggu (*waiting list*) terdapat ratusan bahkan ribuan calon jemaah haji yang sudah berhaji. Selain bertentangan dengan teori keadilan, kurangnya rasa toleransi para pengulang haji tersebut tidak mencerminkan adanya keinginan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat Islam yang lain. Hal ini khususnya bagi pendaftar haji pertama kali dalam perwujudan pemeliharaan terhadap agama (*hifz al-dîn*).

Dengan menerapkan konsep keadilan tersebut, masalah daftar tunggu bisa dikurang meski hanya beberapa namun kendala yang bisa menyebabkan kegagalan keberangkatan yang dirasakan oleh masyarakat tidak akan dirasakan kembali.

D. Efektifitas (SISKOHAT) Sistem Komputerisasi Haji Terpadu dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Bulukumba

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah pendaftar yang sangat signifikan, sehingga menuntut pemerintah untuk mengupayakan pelayanan terbaik dan berkualitas setiap tahunnya. Dalam meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Agama menumbuh kembangkan sistem pendataan pelayanan haji melalui pemanfaatan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan di Tanah Air dan Arab Saudi yang disebut Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Wawancara dengan staf SISKOHAT di Kementerian Agama Bulukumba, tanggal 10 oktober 2017

Siskohat masuk Di Bulukumba itu (beliau sambil mengecek data di komputer) dimulai sejak tahun 2009 dan sebelum adanya siskohat sistem pelayanan haji menggunakan sistem manual, dan pengaturan keberangkatan berdasarkan berapa jumlah orang yang mendaftar dan pada zaman itu tidak ada namanya antrian, emm itu karena berapa yang dulu yang mendaftar belum terlalu sebanyak ini tiap tahun dan juga dulu berapa yang mendaftar itu yang diberangkatkan artinya tidak ada system kuota.

Dari wawancara itu diartikan bahwa kerentanan akan adanya tindak kecurangan dulu bisa saja terjadi, karena sistem yang digunakan masih dengan sistem manual. Pembangunan siskohat dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan

ibadah haji secara signifikan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi dan terpusat memperkecil kemungkinan kesalahan dalam pengisian data atau melakukan kecurangan dalam penetapan nomor porsi calon untuk jamaah haji. Siskohat juga membantu mempercepat proses pembukaan rekening awal pada bank. Beberapa fungsi yang diberikan oleh SISKOHAT menjadi hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan ibadah haji, fungsi dari siskohat seperti yang dikatakan oleh staf penyelenggara SISKOHAT yang ada di Kemenetrian Agama Bulukumba wawancara tanggal 10 Oktober 2017.

Keberadaan SISKOHAT saat ini memberikan kontribusi yang besar dalam pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia, SISKOHAT mempunyai beberapa fungsi :1) Pendaftaran dan penyimpanan database jamaah dan petugas. Ketersediaan database jamaah haji yang semakin terstruktur, dapat mempermudah dan mempercepat melakukan kesiapan-kesiapan dan penyediaan pelayanan akomodasi atau transportasi lebih lanjut; 2) Pendaftaran haji dapat dilakukan sepanjang tahun (non stop); 3) Pemrosesan dokumen paspor dan pemvisaan; 4) Penerbitan Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji (DAPIH); 5) Pembayaran BPIH oleh BPS BPIH secara online dan pada waktu yang bersamaan (*realtime*) langsung dapat dihitung jumlah total dana keuangan setoran BPIH yang tersimpan di setiap BPS BPIH; 6) Pelaksanaan sistem akuntansi BPIH; 7) Proses pembatalan; 7) Penyusunan manifest dan kelompok terbang (kloter); 8) Pemantauan (*monitoring*) *On Time Performance* (OTP) penerbangan; 9) Pemantauan kesehatan jamaah haji; 10) Pemantauan operasional haji di Tanah Air dan di Arab Saudi.

Efektivitas Penerapan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ;

1. Kecanggihan Sistem

Pembaharuan sistem informasi serta kecanggihan teknologi dari tahun ke tahun merupakan salah satu penunjang keberhasilan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di seluruh Indonesia. Dengan format webbase termutakhir yang baru diresmikan oleh Kementerian Agama Pusat pada tanggal 3 April 2014 memberikan kemudahan-kemudahan dalam pengumpulan data, pengolahan data serta ketepatan penyajian informasi. Tampilan web yang menarik serta tampilan menu yang lebih banyak daripada sebelumnya memudahkan para pegawai dalam mengoperasikan sistem komputer beserta komponennya.

2. Sarana dan fasilitas sistem informasi

Kelengkapan fasilitas serta sarana prasana di ruang Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) sangat mempengaruhi efektivitas kinerja civitas pegawai dalam menghasilkan pelayanan yang prima serta keakuratan informasi yang diterima oleh seluruh masyarakat.

3. Sumber Daya Manusia dan Tenaga Ahli

Adanya pembangunan infrastruktur sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu di Kementerian Agama perlu diikuti dengan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Sumber daya manusia dalam pengendalian sistem informasi penyelenggaraan ibadah haji memegang peranan yang sangat penting, karena tanpa adanya sumber daya manusia yang mumpuni sesuai dengan kualifikasi

bidang informasi dan komputer, maka suatu sistem yang terintegrasi sangat sulit dijalankan.

4. Standar Operasional yang Berlaku

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan serta penyediaan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang berorientasi pada asas dan kinerja maka Kementerian Agama memandang perlu menyusun suatu Standar Operasional Prosedur (SOP). Penyusunan SOP SISKOHAT dimaksudkan sebagai suatu kesatuan dalam dokumen Standar Manajemen Mutu (SMM) penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, yang di harapkan nantinya bagian dari persyaratan untuk memperoleh ISO 9001:2008. (Arsip Kementerian Agama Bulukumba,2017).

Dengan demikian pengelolaan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) benar-benar dapat terlaksana tepat sesuai dengan tujuan yang diharapkan sebagai pendukung keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi sekaligus dapat menjadi standar petunjuk penilaian keberhasilan pelayanan. Serta dengan pengolahan SISKOHAT yang baik SISKOHAT menjadi alat Pengendali internal yang sangat efektif dalam menilai dan mencegah kemungkinan terjadinya *fraud*. Hal ini dimungkinkan karena dengan bekerjanya siskohat saat ini yang mana semua sistem pelayanan di input ke dalam system database yang ada di siskohat dan data tersebut dikirim langsung ke Kemenetrian Agama Pusat, dari awal pendaftaran sampai dengan akhir kepulangan.

E. Pengendalian Internal dalam Mencegah Terjadinya fraud pada Sistem Manajemen Haji di Kementerian Agama Bulukumba

Pengendalian Internal adalah sebuah sistem yang dibangun untuk memberikan pengamanan terhadap kekayaan yang dimiliki oleh setiap bagian dalam suatu organisasi, suatu pengendalian merupakan tanggapan terhadap suatu ancaman. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 “Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai yang memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan aturan.”

Di lingkungan pemerintahan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sangatlah penting. Ketaatan perundang-undangan merupakan salah satu kewajiban dari pemerintah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran terhadap hukum yang akan mengakibatkan tindak pidana maupun perdata untuk pemerintah itu sendiri. Pengamanan aset Negara merupakan isu yang penting yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, jika terdapat kelalaian dalam pengamanan aset Negara akan berakibat mudahnya terjadi penggelapan, pencurian dan bentuk manipulasi lainnya. Upaya pengamanan aset ini antara lain dapat dilakukan melalui pengendalian internal yang efektif dan efisien (Putri, 2014).

Pengendalian Internal memerlukan pengawasan untuk memastikan Pengendalian Internal dapat berjalan secara efektif. Dalam pandangan Islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam islam terbagi menjadi dua hal, yaitu pertama, control yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti selalu mengawasi hamba-hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati. Dalam surat Al-Mujadilah Ayat 7, telah dijelaskan bahwa:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ جَوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahan : tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengendalian tersebut dilakukan dari luar diri sendiri, pengendalian internal dari luar inilah yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Instansi Pemerintah penting untuk menerapkan Sistem Pengendalian Internal untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan yang

dapat merugikan instansi, serta penerapan Sistem Pengendalian Internal secara baik yang diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan Kepuasan Kerja karyawan (Putri, 2014). Ada lima bentuk komponen pengendalian internal, yaitu pengendalian lingkungan, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi & komunikasi, serta pemantauan. Baik itu pengendalian untuk instansi pemerintahan ataupun perusahaan kelima komponen tersebut sangat dibutuhkan dalam menjalankan pengendalian internal.

Tidak berjalannya sistem pengendalian intern, memungkinkan terjadinya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan belum memenuhi karakteristik yang berkualitas yang disebabkan oleh adanya kecurangan di dalam laporan keuangan tersebut. Kecurangan akuntansi sangat erat hubungannya dengan etika. Kecurangan akuntansi merupakan suatu tindakan ilegal. Menurut (Baucus, 1994) dalam (Hernandez dan Groot, 2007) dalam (Puspasari, 2012), secara umum perilaku ilegal adalah bagian dari perilaku tidak etis, oleh karena itu ada hukum yang harus ditegakkan sebagai bagian dari usaha penegakkan standar moral. Penelitian dari (Hernandez dan Groot, 2007) dalam (Puspasari, 20112) menemukan bahwa etika dan lingkungan pengendalian akuntansi merupakan dua hal yang sangat penting terkait kecenderungan seseorang dalam melakukan kecurangan akuntansi.

Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan ekonomi yang cepat, persaingan, pergeseran permintaan pelanggan serta

restrukturasi untuk kemajuan yang akan datang (Ruslan, 2009) dalam (Hermiyetti, 2007) dalam (Adelin dan Fauzihardani, 2013). Selain itu sejalan dengan teori *stewerrdsip* manajemen akan menjadi pondasi utama dalam melakukan penarapan pengendalian internal. Sebuah pengendalian internal akan berjalan dengan baik apabila manajemen juga menginginkan adanya bentuk pengendalian tersebut

Kecenderungan kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh ada atau tidaknya peluang atau kesempatan. Peluang yang besar membuat kecenderungan kecurangan akuntansi lebih sering terjadi, dan sebaliknya. Penerapan pengendalian internal yang efektif yang didukung dengan regulasi yang memadai akan mencegah berbagai bentuk ketidakwajaran yang merugikan berbagai pihak yang bekepentingan. Ketidakwajaran itu ketika pengendalian internal kurang memadai, artinya saat komponen-komponen tersebut tidak dijalankan dengan baik maka kecuranga bisa saja terjadi, kecurangan yang bisa terjadi mengenai manipulasi data yang dilakukan oleh staf haji untuk kepentingan pribadi seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu informan dari calon jamah haji, dalam sebuah wawancara dengan calon jamaah haji

Sebenarnya itu, saya sudah mendaftar lama, tapi saya belum berangkat sampai sekarang tapi waktu tahun lalu ada orang yang sudah berangkat haji lebih duluanki dari saya padahal saya duluan yang mendaftar dari dia. Enda tauma kenapa itu kukira saya karena mungkin lebih banyak dia nabayar, makanya dia dulu berangkat dari saya

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa adanya oknum-oknum tertentu yang sengaja melakukan manipulasi data untuk kepentingan pribadi.

Sehingga bisa saja kepentingan pribadi menyebabkan adanya tindak kecurangan berupa manipulasi data, yang dilakukan oleh staf yang tidak bertanggungjawab.

Sistem dalam pengelolaan manajemen haji dikembangkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Agama, sistem tersebut disebut dengan SISKOHAT (sistem terkomputerisasi haji terpadu) dengan sistem tersebut pemerintah mengharapkn pengelolaan akan berjalan dengan baik dan masksimal. Penyelenggaraan haji saat ini dengan adanya SISKOHAT semakin mudah, artinya meski adanya kemungkinan seseorang ingin berbuat kecurangan berupa manipulasi data akan sangat mudah terdeteksi. Hal ini sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh informan, dalam wawancara tanggal 10 oktober 2017.

Sistem pengendalian internal yang paling bisa terlihat adalah dengan penerapan SISKOHAT, jadi semua data terkait calon jamaah haji dan dana haji sudah tercantum langsung kedalam siskohat tersebut, jadi walaupun seseorang mencoba melakukan tindakan manipulasi data misalnya, akan dengan mudah dideteksi oleh siskohat, karena cara pengolahan siskohat, dimulai dari sidik jari sampai dengan mata semua di scan. artinya pengendalian internal dalam Kementerian Agama dalam hal seksi haji yah itu adanya siskohat itu.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa siskohat menjadi tiang utama bagi pelayanan haji untuk sekarang ini, dimana SISKOHAT tidak hanya mengurus masalah pendaftaran dan dokumen lain, namun juga terkait dengan masalah dana haji. Pengendalian yang diterapkan dalam SISKOHAT menjadikan semua data tersimpan dengan baik, dan dapat diketahui apabila ada perubahan pada data yang tersimpan, sejalan dengan teori *stewardship* yang menggambarkan situasi diaman pengendalian diri dari manajemen.

Menurut (Donald dan Davis, 1989) dalam (Husain dan Abdullah, 2015) Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya.

Namun terlepas dari baiknya sistem SISKOHAT menjalankan tugasnya dalam menjadi alat pengendali internal, ditemukan bahwa masih kurangnya penerapan komponen pengendalian internal dalam hal ini komponen yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menjadi komponen yang sangat penting dalam penerapan pengendalian internal, hal ini dikarenakan lingkungan pengendalian menjadi penentu komponen pengendalian yang lain berjalan dengan baik. Dengan penerapan yang maksimal dari lingkungan pengendalian yang dilakukan oleh kepala Kasi Haji terhadap stafnya atau bahkan karyawan lain yang ada di Kementerian Agama yang memungkinkan kasus yang dialami oleh ibu indah bisa terjadi. Dengan penerapan komponen pengendalian internal manajemen akan lebih mementingkan kepentingan instansi tanpa harus mementingkan kepentingan individu.

Pandangan teori *stewardship* menjadi landasan utama bahwa manajemen harus sejalan dengan apa yang diinginkan oleh instansi, karena penerapan SISKOHAT dan segala hal mengenai penerapannya akan senantiasa berjalan searah dengan manajemen. Pencegahan *fraud* dalam hal ini berupa manipulasi data harus diperhatikan dengan baik oleh manajemen, meski dalam masanya belum ada tindak kecuranagn yang dilihat secara langsung, perlunya pengendalian internal untuk

melakukan pencegahan kecurangan itu sangat diperlukan oleh pihak manajemen. Menurut Rezaee dan Richard (2010:48) dalam (Purwanti dan khikma, 2013) menjelaskan ada tiga unsur yang harus diperhatikan oleh pihak manajemen perusahaan bila ingin mencegah terjadinya tindakan *fraud*, yaitu:

1. Menciptakan dan mengembalikan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika yang tinggi, meliputi:
 - a) *Setting at the top*, penelaahan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memperoleh pengertian mengenai peraturan-peraturan yang bersifat umum yang ditetapkan pada semua instansi.
 - b) Merekrut dan mempromosikan karyawan yang tepat, yaitu setiap perekrutan staff dilakukan penyeleksian dan ditempatkan sesuai bidang keahliannya.
 - c) Pelatihan, setiap anggota organisasi seharusnya mengikuti pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja.
 - d) Disiplin, yaitu mentaati peraturan-peraturan yang telah dibuat.
2. Penerapan dan evaluasi Proses Pengendalian anti kecurangan, yaitu:
 - a) Mengidentifikasi kasi dan mengukur risiko fraud
 - b) Pengurangn risiko fraud
 - c) Implementasi dan monitoring pengendalian intern.

3. Pengembangan Proses Pengawasan (Oversight Process), untuk mencegah dan menangkal fraud secara efektif instansi hendaknya mempunyai fungsi pengawasan yang tepat.

Dari unsur-unsur itu setidaknya kepala kasi haji dan umroh bisa melakukan pengawasan secara detail terhadap hal-hal yang dianggap bisa menjadi acuan tindak kecurangan. Pengendalian intern yang secara khusus ditujukan untuk menangani *fraud* merupakan suatu sistem dengan proses dan prosedur yang bertujuan khusus, dirancang dan dilaksanakan untuk tujuan utama, untuk mencegah dan menghalangi (dengan membuat jera) terjadinya kecurangan.

F. Trilogi Akuntabilitas Dalam Mencegah Fraud Pada Manajemen Haji Kementerian Agama Bulukumba

Sebuah Konsep Akuntabilitas diberikan dari sisi syariah, dimana konsep akuntabilitas tersebut tidak hanya menekankan pada bentuk pertanggungjawaban kepada manusia atau yang memberikan amanah. Konsep akuntabilitas yang digusung dari perspektif syariah yang menjadikan pertanggungjawaban yang tinggi kepada tuhan. Trilogi Akuntabilitas sebuah konsep kehidupan secara Islami yaitu manusia dalam eksistensinya harus didukung oleh ketiga komponen yaitu kehadiran Tuhan, Manusia dan Alam. Seperti halnya dengan apa yang dimaksudkan dalam *Syari'ah Enterprise Theory* (SET). Dalam *Syari'ah Enterprise Theory* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Mengemban tugas/amanah dengan segala keihlasan dan ikhtiar dalam menjalankan

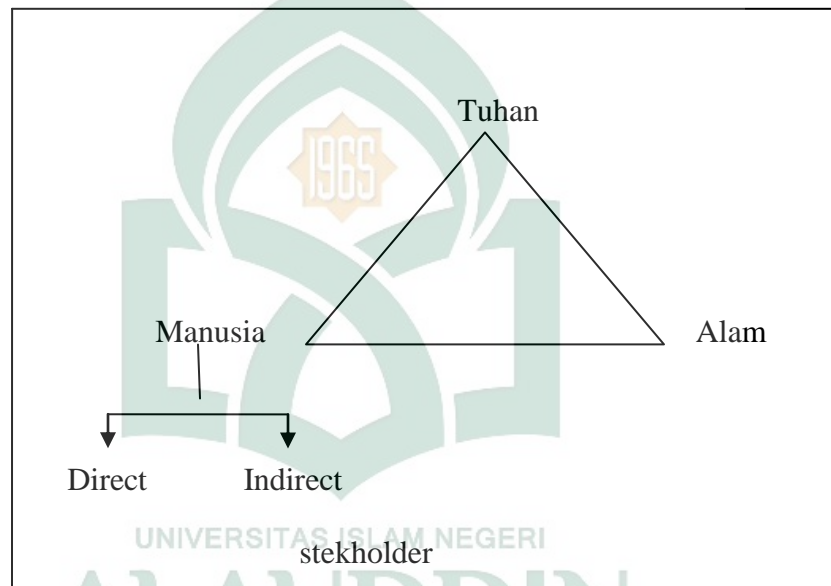
- 2) Mementingkan kepentingan *direct and indirect stakeholder* serta alam.
- 3) Menjunjung etika bisnis yang islami (halal-haram). (Amereiska, 2015)

Jika digambarkan bentuk trilogy akuntabilitas sebgai berikut

Gambar 4.3

Hubungan Tuhan, Alam, dan Manusia

(Berdasar Shari'ate Enterprise Theory)



Tuhan sebagai kausa prima dalam ilmu filsafat menjadikannya sebagai pusat pertanggungjawaban puncak, manusia merupakan hubungan horisontal antar sesama hamba dimuka bumi ini sedangkan alam disini yang menjadi pijakan dalam mengolah dan beribadah terhadap tuhan yang Maha Esa (Husain dan Abdullah, 2015).

Ketiga aspek dalam trilogi akuntabilitas merupakan suatu kesatuan (manunggaling) yang tak terpisahkan dan memiliki keterkaitan yang erat. Akuntabilitas adalah sebuah bentuk sikap yang harus dimiliki oleh setiap manusia, terlebih untuk orang-orang yang bekerja di mana dia mengembangkannya dari masyarakat.

Mardiasmo (2005:20) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa substansi akuntabilitas adalah sebuah kewajiban untuk memberikan penjelasan dan jawaban tentang pelaksanaan tanggung jawab bagi hak yang mempercayakan tanggungjawab. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Al-Mukminun /23:8, yang berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

 وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

8. dan (sungguh beruntung) orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk senantiasa menjaga amanah yang sudah diberikan kepada kita. Manajemen haji sejak dulu sampai sekarang menjadi sorotan publik, hal ini terkait dengan masalah-masalah yang begitu banyak bermunculan,. Salah satu masalah yang ditakutkan adalah adanya

tindak kecurangan yang bisa saja terjadi. Kecurangan atau *Fraud* adalah tindakan penipuan yang disengaja, umumnya dalam bentuk suatu kebohongan, penjiplakan dan pencurian (sayyid, 2014), ditambah kecurangan menjadi cikal bakal terjadinya sebuah tindak korupsi. Kecurangan menjadi isu yang sangat sensitive dikalangan masyarakat, karena terkait dengan masalah dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Agama SDA.

Dugaan korupsi yang dilakukan oleh SDA kala itu terkait dengan dana haji memberikan efek besar terhadap berkurangnya kepercayaan masyarakat terkait pengolahan dana haji yang dilakuakn oleh pemerintah. Korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Agama itu, terjadi karena tidak adanya *transparency* di Kementerian Agama. Upaya untuk tidak memberikan informasi secara transparan menimbulkan adanya dugaan *information asymmetry* yang berujung pada kecurangan akuntansi di pemerintahan yang menjadi alat pejabat pemerintah melakukan korupsi. Oleh karena itu, pengelolaan pemerintah daerah harus akuntabel dan diawasi (*checks and balances*) untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan dengan menerapkan Sistem Pengendalian Intern.

Munculnya berbagai isu setelah kejadian korupsi tersebut memberiakan dampak besar kepada Kemeneterian Agama sehingga pentingya transparansi dan akuntabilitas serta pertahanan diri, mengakibatkan trilogy akuntabilitas sangat dibutuhkan, dimana adanya komponen Allah, Manusia dan Alama. Dengan keterkaitan ketiga elemen ini maka akan mampu untuk membentuk pertanggungjawaban yang jauh lebih baik.

Ketiga aspek dalam trilogi akuntabilitas merupakan suatu kesatuan (manunggaling) yang tak terpisahkan dan memiliki keterkaitan yang erat.

1. Hablumminallah sebagai aspek hubungan Manusia dengan Allah SWT.

Ibadah adalah sesuatu yang sangat diyakini oleh setiap pihak harus dilakukan dengan penuh keikhlasan, tidak terkecuali untuk para pekerja di Kementerian Agama Bulukumba, khususnya pada Seksi Haji dan Umroh. Keyakinan bahwa mereka bekerja atas dasar amanah menjadikan mereka bekerja atas dasar ibadah. Keyakinan itu menjadikan mereka bekerja dengan penuh keikhlasan, ditambah dengan label Agama, menjadikan karyawan menjunjung tinggi visi misi yang diemban dalam kementerian agama tersebut. Dalam pandangan trilogi akuntabilitas atas aspek hubungan manusia dengan Allah adalah bagaimana manusia mendekatkan diri dengan Allah SWT. Kedekatan dengan Tuhan yang maha penguasa dinampakkan dengan terdapatnya Al-Qur'anul Karim yang terlihat jelas pada ruang kerja para karyawan serta diwajibkannya mengucapkan salam setiap masuk dalam ruangan. Keyakinan paling tinggi adalah pada seksi Haji dan umroh yang mana menjadikan mereka senantiasa mengingat Allah karena apa yang mereka kerjakan merupakan membantu masyarakat agar bisa menunaikan rukun islam yang kelima tersebut.

Kenyataan itu akan membangun sendiri rasa tanggungjawab kepada klausa tertinggi yaitu Allah SWT. dengan demikian maka sudah jelas tingkat hubungan karyawan dengan Sang Pencipta selalu terjaga dan terpenuhi spritualitasnya. Bekerja dengan keyakinan itu menjadikan kita menafsirkan bahwa bekerja tidak hanya

sekedar mengejar apa yang ada didunia saja, dengan meyakini bahwa ada bentuk pertanggungjawaban kepada sang pencipta menjadikan pekerjaan yang dijalani akan lebih bermakna, dengan memberikan bantuan serta keikhlasan penuh pada bantuannya kepada calon jamaah haji membentuk karakter pada kasi haji dan umroh bahwa mereka akan lebih dekat dengan Allah swt.

2. Hablumminannas Sebagai Aspek Hubungan Manusia dengan manusia

Pada dasarnya kasi haji dan umroh di Kementerian Agama Bulukumba, menjalankan fungsinya dengan baik ini sejalan dengan apa yang dikatakan dalam wawancara tgl 10 oktober 2017

Kami menjalankan pekerjaan ini dengan keikhlasan, dengan fungsi kami melayani masyarakat dengan baik, ada istilah bahwa setiap masyarakat yang datang disini itu beragam, jadi sebelum melayani mereka kita akan melihat bagaimana orang tersebut, istilahnya kita akan membiarkan dia menyampaikan maksud dan tujuannya, dan melayaninya dengan apa yang diinginkan. Dan yang paling rumit saat calon jamaah haji itu tidak mengetahui apapun dalam melakukan registrasi, jadi dengan sabar kami mambantu mereka bahkan tidak jarang kami menuliskan manual data pribadi calon jamaah haji agar calon jamaah haji tidak mengalami kerumitan dalam peregristrasian dalam mendaftar haji.

Dari wawancara tersebut jelas bahwa adanya tanggungjawab yang dijalankan oleh pihka staf dalam pekerjaanya, dapat disimpulkan bahwa para karyawan memiliki rasa kasih yang tinggi. Rasa kasih ini kemudian diinteraksikan kepada karyawan tersebut, serta diiteraksikan ke orang lain (*potential constumer*) demikian seterusnya, sehingga tercipta lingkungan yang penuh dengan rasa kasih (triyuwono, 2006). Terciptanya rasa kasih dalam diri setiap karyawan akan tercipta pula tempat

sama tim yang harmonis, demi menciptakan suasana kerja yang harmonis selalu dibutuhkan koordinasi sesama karyawan agar dalam mengatasi sebuah problem dapat diatasi dengan bermusyawarah atau diskusi yang nantinya akan menghasilkan keputusan yang sesuai dengan kesepakatan dan tidak ada lagi yang merasa terasingkan.

Hal ini dijelaskan dalam QS. Ali'Imran/3:159.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Dari ayat tersebut jelas, diserukan bahwa kita harus senantiasa saling menyayangi dan membantu satu dengan yang lainnya sebagai sesama manusia yang beragama. Dengan penerapan trilogi akuntabilitas dalam hal pertanggungjawaban kepada sesama manusia akan memberikan kepercayaan kepada calon jamaah haji, kemungkinan terjadinya kecurangan yang disebabkan oleh tidak adanya rasa tanggungjawab dari karyawan tidak akan terjadi. Pentingnya rasa saling percaya antara pihak kepala seksi haji dan umroh serta para stafnya akan menimbulkan rasa percaya dari masyarakat, karena melihat kesungguhan dari mereka bekarja.

3. Hablum Fil Ardh sebagai aspek hubungan Manusia dengan alam

Selain ketetapan bahwa manusia harus senantiasa menjaga agar selalu dekat dengan sang pencipta, serta membangun rasa saling menyayangi sesama manusia, islam juga tidak membiarkan manusia untuk melupakan lingkungan mereka tinggal. Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti, lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan disekitarnya. Perilaku positif dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari dan perilaku negatif dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Integritas ini pula yang menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan kehidupan di sekitarnya (harahaf, 2015).

Berpandangan dari hal tersebut manusia dan alam (lingkungannya) saling membutuhkan, dengan konsekuensinya kedua-duanya agar saling menjaga untuk *sustainability* keberadaannya. Dengan pendekatan trilogi akuntabilitas, dimensi hubungan dengan alam merupakan hubungan yang selalu saling membutuhkan. Animo masyarakat yang meningkat tiap tahunnya dalam melaksanakan rukun islam yang kelima itu tak luput dari sejahteranya hidup masyarakat, alam memberikan peranan penting dalam pembentukan kesejahteraan masyarakat. Selain itu Bulukumba adalah kota yang hampir separuh masyarakatnya memiliki propesi yang mengandalkan alam.

Dengan memiliki rasa tanggung jawab kepada alam, manusia akan menciptakan lingkungan yang baik, manusia yang mencintai lingkungan yang baik akan memiliki rasa kasih, cinta dan taqwa. Dengan menggunakan pendekatan dimensi hubungan manusia dengan alam semesta dalam trilogi akuntabilitas kegiatan tersebut adalah sebuah implementasi hubungan dengan alam secara dinamis. Hubungan ini adalah sebuah bentuk kepedulian terhadap alam agar nantinya saling memberi dan saling menunjang eksistensi keduanya.

Rasa tanggungjawab diri kepada calon jamaah haji memungkinkan bagi karyawan memiliki pertahanan diri dalam menerima hal-hal yang berbau kecurangan. Seperti halnya yang dilakukan oleh kasi haji dan umroh Kementerian Agama Bulukumba, dalam membangun rasa percaya dan tanggungjawabnya kepada setiap jamaah haji yang datang untuk mendaftar, berdasarkan wawancara oktober 2017:

Seperti halnya waktu satu minggu yang lalu ada keluarga dari salah satu staf kami datang untuk mendaftar sebagai calon jamaah haji, namun waktu pelayanan kami sudah tutup, karena waktu itu sudah masuk waktu sholat dan istirahat, namun keluarga tersebut malah minta dilayani, dengan memberikan tawaran untuk dia membelikan makanan kepada staf saya. Namun dengan tegas karyawan kami mengatakan, akan lebih baik dan anda mungkin membantu saya jika anda tidak melakukan hal tersebut.

Dari wawancara tersebut jelas, bahwa ada hal yang diyakini staf Haji dan umroh untuk membangun kepercayaan dari masyarakat. Dan staf haji dan umroh juga membangun rasa tanggungjawab kepada calon jamaah haji yang lain bahwa keadilan yang kami junjung tinggi dalam bekerja. Namun pada satu kesempatan ketika penelitian ini dilakukan seorang keluarga dari salah seorang karyawan di

Kementerian Agama, datang secara langsung untuk mengecek waktu keberangkatn haji miliknya, karyawan tersebut bukan dari staf manajemen haji dan umroh, keluarga tersebut meyerahkan dua lembar kertas dan menayakan kepada karyawa tersebut

dalam (bahasa bugis) “apakah waktu keberangkatannya tidak bisa dipercepat?” dan karyawan tersebut menjawab “ ini sulit karena nomornya masih lama, namun untuk yang satunya nanti saya konfirmasi ulang”.

Dari percakapan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa, para staf di bagian manajemen haji dan umroh bisa menjalankan akuntabilitas secara nyata namun untuk pihak lain akuntabilitas itu masih sangat rendah sehingga manipulasi tersebut masih bisa terjadi. Adanya konsep Trilogi Akuntabilitas ini kedalam manajemen haji memberikan adanya pertahanan diri kedalam diri setiap indipidu yang ada dalam manajemen haji di Kementerian Agama, pertahana diri berupa munculnya rasa tidak ingin berbuat salah karena berpikir tanggungjawab sangatlah penting untuk dijalankan.

Akuntabilitas dalam sebuah oraganisasi pemerintah sangatlah penting, meski sangat kurangnya kecurangan secara langsung yang bisa terjadi namun kecurangan secara tidak langsung bisa saja terjadi seperti halnya adanya pungutan-pungutan yang bisa saja dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil keuntungan dari masyarakat yang kurang paham mengenai aturan-aturan yang ada dalam proses pendaftaran haji. Sehingga perlunya tarnsaparansi dan akuntabilitas sangat dibutuhkan oleh masyarakat, transparansi akan bermanfaat kepada masyarakat yang kurang paham akan aturan-aturan tertentu. Akuntabilitas

akan lebih mudah di jalankan apabila ia menerapkan konsep trilogy akuntabilitas, hal ini karena mereka akan pertama memikirkan bahwa mereka harus bertanggungjawab bukannya hanya kepada manusia semata, namun juga kepada sang pencipta.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menjawab rumusan masalah, dan dari hasil pembahsan dapat disimpulkan yang pertama terkait bagaimana bentuk pengendalian internal pada manajemen haji di Kementerian Agama Bulukumba. Melalui pembahasan pada Bab IV dapat dilihat bahwa, salah satu bentuk pengendalian internal dalam manajemen haji adalah dengan menyelaraskan sistem komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT).

Namun selain dari hal itu, pihak manajemen haji di Kementerian Agama Bulukumba, masih sangat kurang dalam menerapkan komponen pengendalian internal yang mana komponen tersebut adalah lingkungan pengendalian, pengawasan terhadap setiap staf yang dilakukan oleh staf masih sangat kurang. Kedua, terkait bagaimana trilogi akuntabilitas menjadi bagian dalam kegiatan transparansi dalam penyelenggraan haji di Kementerian Agama Bulukumba.

Sebenarnya secara tidak langsung selama ini penerapan aspek trilogi ini telah diajalkan dan diaplikasikan. Namun, secara aplikasi yang matang masih perlu untuk dikembangkan lagi agar pada akhirnya benar-benar terwujud pertanggungjawaban yang mengarah pada ketaatan terhadap Tuhan, manusia dan alam.

Selain itu *waiting list* adalah sistem yang disebabkan karena kurangnya kuota yang diberikan, dan tidak terorganisasinya data Kementerian Agama mengenai jamaa-jamaah yang sudah dan belum berangkat sehingga mengakibatkan, adanya calon jamaah haji yang masih menunggu lama untuk berangkat.

B. Implikasi Penelitian

1. Kementerian Agama lebih transparan terhadap pengolahan dana haji dan penyelenggaraan haji kepada masyarakat kedepannya
2. kepala seksi haji dan umroh lebih memperhatikan komponen dari pengendalian internal dan mengoptimalkan pentingnya trilogy akuntabilitas dan di terapkan kepada staf yang lain.
3. Pihak kementerian Agama mensosialisasikan bagaimana cara kerja SISKOHAT dan bagaimana bisa seorang calon jamaah haji bias berangkat sampai 25 tahun kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Adelin, Vani dan Eka Fauzihardani. 2013. "Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan pada Aturan Akuntansi dan Kecenderungan Kecurangan Terhadap Perilaku Tidak Etis". *WRA*. Vol. 1. No. 2: 259-276.

Astuty, Christina Budi. 2002. "Analisis Pengendalian Intern terhadap Sistem Akuntansi Penggajian Studi Kasus pada PT Telkom Divisi Regional II Jakarta". *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Amerieska, Siti. 2015. "Pengembangan Model Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Berbasis Shariate Enterprise Theory". *Syariah Paper Accounting FEB UMS*. ISSN 2460-0784: 386-399

Arsip Kementerian Agama Bulukumba. 2017

At-Tuwajiri, Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. 2012. Mukhtashar al-Fikhi Al-Islami. Terj. Zeny Njib, *Ensiklopedia Islam Lengkap*. Yogyakarta: Ghani Pressindo.

Awal, andi. <http://sulsel.pojoksatu.id/read/2016/04/06/daftar-haji-di-bulukumba-tahun-ini-berangkat-30-tahun-lagi/>. Diakses pada 21 Juli.2017.

Farhanah, Nida. 2016. "Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia". *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*. Vol. 12. No. 1: 57-80.

Fathurahman. 2016. "Kinerja Pegawai Kementerian Agama dalam Meningkatkan Pelayanan Urusan Haji di Kabupaten Penajam Paser Utara". *eJournal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 4. No. 1: 485-499.

Hasanah, Uswatun. 2015. "Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kesehatan Finansial Pada Bank Umum Syariah". *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Husain, Saddam dan Wahyuddin Abdullah. 2015. "Metafora Amanah Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebagai Penopang Asset Perbankan Syariah Ditinjau Dari Aspek Trilogi Akuntabilitas" (Studi Kasus Pada Pt. Bank BNI Syariah Cabang Makassar). *Iqtisaduna*. Vol 1. No 2: 40-64.

- Jafar, Tri Dya Fitrisah. 2012. "Analisis Pendistribusian Laba Dalam Akuntansi Syariah Untuk Mencapai Prinsip Keadilan" (Study Kasus Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk.) *Skripsi*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Kalbararini, Rahma Yulisa. 2014. "Implementasi Akuntabilitas dalam Konsep Metapora Amanah di Lembaga Bisnis Syariah (studi kasus: swalayan Pamella Yogyakarta)" *E-jurnal Unair*. Vol 1. No 7.
- Kurniawati, Eka. 2013. "Peranan Manajemen Dan Inspektorat Jenderal Terhadap Pengendalian Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pada Kementerian Agama" *Skripsi*. Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Laporan. 2017. "Pungutan Di Luar Biaya Haji Tahun 2014 di Kantor Departemen Agama Bulukumba <https://www.lapor.go.id/pengaduan/1255269/reformasi-birokrasi-dan-tata-kelola/pungutan-di-luar-biaya-haji-tahun-2014-di-kabupaten-bulukumba.html>. Diakses pada 5 Maret 2017.
- Maharani, Putri Oceana. 2013. Pengaruh Efektivitas Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Perkreditan Pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 5. No. 3: 666-675.
- Meilani, Sayekti Endah Retno., Dita Andraeny dan Anim Rahmayati. 2014. "Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Menggunakan pendekatan islamicity Indices". *Syariah Paper Accounting FEB UMS*: 22-38.
- Munawaroh, Zahrotun, M. Mudhofi dan Dedy Susanto. 2015. "Efektivitas Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji". *Jurnal Ilmu Dakwah*: 225-248.
- Mulyadi, Mohammad. 2011. "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya". *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*. Vol. 15. No. 1: 127-138.
- Nisak, Chairun., Prasetyono, dan Fitri Ahmad Kurniawan. 2013. "Sistem Pengendalian Intern Dalam Pencegahan Fraud Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Pada Kabupaten Bangkalan". *Jaffa*. Vol. 1. No. 1: 15-22.
- Nugroho, Tomi. 2012. Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Studi Kasus Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Kota Administrasi Jakarta Utara. *Skripsi*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Putri, Ananda Aprishella Parasmita Ayu. 2014. "Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

- pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Jurnal Nominal*. Vol. 3. No. 1.
- Prabowo. 2017. “Manajemen Haji di Indonesia Masih Bermasalah”. *Okezone News*. <http://news.okezone.com/read/2016/08/28/337/1474863/dinsyamsudin-manajemen-haji-di-indonesia-masih-bermasalah>. Diakses pada 5 Maret 2017.
- Purnomo, Ragil. 2015. “Manajemen Pelayanan calon Jamaah Haji(studi kasus panitia penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Solo Of City Musim Haji Tahun 2015)”. *Skripsi*. UIN Sunan kalijaga. Yogyakarta.
- Purwantini, Anissa Hakim dan Siti Noor Khikmah. 2013. “Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Melalui Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Intervening”. Universitas Muhammadiyah, Magelang.
- Rahmatullah. Diakses pada <http://sulsel.pojoksatu.id/read/2016/04/06/daftar-haji-di-bulukumba-tahun-ini-berangkat-30-tahun-lagi.html>. Diakses 27 Juni 2017.
- Rini, Viva Yustita dan Tarmizi Achamd. 2012. “Analisis Prediksi Potensi Risiko Fraudulent Financial Statement Melalui Fraud Score Model”. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.1 No 1.: 1-15.
- Santoso, Heri. <http://muarapena.blogspot.co.id/2014/05/ini-dia-detail-kasus-yang-menjerat.html>. Diakses pada 08 Juni 2017.
- Sayyid, Annisa. 2014. “Pemeriksaan Fraud Dalam Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif”. *Al-Banjari*, Vol. 13. No. 2: 137-162.
- Setiawan, wahyu . 2012. “Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia”. *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Setyosari, Punaji. 2013. “Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan”. Malang: Kencana.
- Shihab, M. Quraish. 2012. “Tafsir Al-Misbah “Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an”. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati.
- Sketsa, Nawa. “Data Daftar Tunggu Haji, Kuota dan Tahun Keberangkatan”. <http://sketsanews.com/540514/.html>. Diakses pada 21 Juli.2017.
- Suwarno, Joko Sulak . 2016. “Manajemen Pelayanan Jamaah Haji Kementerian Agama Kabupaten Kendal Tahun 2015”. *Skripsi*. UIN Walisongo, Semarang.

Triyuwono, Iwan. 2006. “Akuntansi Syari’ah: Menuju Puncak Kesadaran Ketuhanan Manunggaling Kawulo-Gusti”.

Yusni, Muhammad Ali. 2015. “Studi Tentang Pelayanan Haji Di Kementerian Agama Kota Samarinda”. *E-journal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3. No. 1: 318 – 332.

Zubaedi. 2016. “Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern)”. *Manhaj*. Vol. 4. No. 3: 189-200.

<http://www.sangpencerah.com/2013/09/problematika-penyelenggaraan-ibadah-haji.html>).



LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Nomor : 490/UEB.VPP.00.9/2017

Lamp :

Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Samata, 29 Agustus 2017

Kepada,

Yth. Kepala UPT P2T BKPM
Sulawesi Selatan

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama	: Sri Rosfina Umar
NIM	: 10800113005
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Akuntansi
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Samata

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya " Analisis Pengendalian Internal dan Trilogy Akuntabilitas untuk mencegah Terjadinya Fraud pada Sistem Manajemen Haji (Studi pada Kementerian Agama Wilayah Bulukumba)"

Dengan Dosen pembimbing:

1. Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
2. Sumartini, SE., M.Ak.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian di Kementerian Agama Wilayah Bulukumba.

Demikian harapan kami dan Terima Kasih,

Wassalam
Dekam



Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIM: 5581022 198703 1 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata/Gowa
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arap



120171914213335

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 13154/S.01P/P2T/08/2017
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Bulukumba

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 4902/EB.I/PP.00.9/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : SRI ROSFINA UMAR
Nomor Pokok : 10800113005
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL DAN TRILOGY AKUNTABILITAS UNTUK MENCEGAH TERJADINYA FRAUD PADA SISTEM MANAJEMEN HAJI (STUDI PADA KEMENTERIAN AGAMA WILAYAH BULUKUMBA) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 30 Agustus s/d 30 Oktober 2017

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 29 Agustus 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A.M. YAMIN SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth:

1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar,
2. Peringgal





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2025 TAHUN 2017**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- | | | |
|-----------|--|--|
| Membaca | Surat permohonan
NIM
Tanggal
Mahasiswa Jurusan
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul "Analisis Pengendalian Internal dan Triaggy Akuntabilitas untuk Mencegah Terjadinya Fraud pada Sistem Manajemen Haji (Studi Pada Kementerian Agama Wilayah Bulukumba)" | : Sil Restina Umar
: 10800113005
: 21 November 2017
: Akuntansi |
| Menimbang | 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian. | |
| Meringkat | 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI, No. 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 241 B Tahun 2010 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin. | |

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi |
|------------|---|
- | | |
|---------------|-------------------------------------|
| Ketua | : Prof. Dr. H. Amba Asse, M.Ag. |
| Sekretaris | : Dr. H. Abd. Wahab, SE., M.Si. |
| Penguji I | : Mustakim Muchlis, SE., M.Si. |
| Penguji II | : Memen Suwandi, SE., M.Si. |
| Pembimbing I | : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag. |
| Pembimbing II | : Sumarlin, SE., M.Ak. |
| Pelaksana | : Drs. H. M. Ridwan, M.Si. |
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
 3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
 4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana na mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di: **Samata-Gowa**
Pada tanggal: **23 November 2017**
Dekan

Prof. Dr. H. Amba Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)**

Alamat : Jalan Durian Nomor 2 Bulukumba, Telp. (0413) 81102 Kode Pos 92511

Bulukumba, 9 Oktober 2017

Nomor : 884/Balitbangda/X/2017
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Kementerian Agama
Kab. Bulukumba
di
Bulukumba

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Makassar, Nomor:13154/S.01P/P2T/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017, perihal Izin Penelitian, maka yang tersebut di bawah ini:

Nama : SRI ROSFINA UMAR
Nomor Pokok : 10800113005
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud melakukan penelitian/pengambilan data di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba dalam rangka Penyelesaian Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) dengan judul **"ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL DAN TRILOGY AKUNTABILITAS UNTUK MENCEGAH TERJADINYA FRAUD PADA SISTEM MANAJEMEN HAJI (STUDI PADA KEMENTERIAN AGAMA WILAYAH BULUKUMBA"** yang akan berlangsung pada tanggal 9 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat;
3. Penelitian/pengambilan data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



MUHAMMAD AMRAL, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
19620416 199303 1 004

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;
3. Arsip.



**+KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 442 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBIMBING/PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN Akuntansi FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Nama Sri Roslina Umar , NIM: 10800113005 tertanggal 24 Februari 2017 untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: "Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntabilitas dan triologi Akuntabilitas dalam Mercegah Terjadinya Fraud pada Sistem Manajemen Haji 9Studi pada kementerian Agama Wilayah Bulukumba) "
- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempumakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI, No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 Jo tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Mengangkat/ Menunjuk saudara :
1. Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag. , Sebagai Pembimbing Pertama.
2. Sumartin, SE., M.Ak., Sebagai Pembimbing Kedua.
- Kedua** : Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah,
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
pada tanggal : 28 Februari 2017



Dr. H. Ambo Asse., M.Ag
NIB. 99561022 196703 1 002



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1540 TAHUN 2017**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI KOMPREENSIF
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat permohonan Ujian Komprehensif Sri Roslina Umar : NIM: 10800113005
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk Panitia dan Tim Penguji
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Komprehensif, Jurusan **AKUNTANSI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Ketua | : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag. |
| Sekretaris | : Numsiah Muli, S.I.P., MM. |
| Penguji Dirasah Islamiyah | : Dr. Hj. Rahmawati Muli, M.Ag. |
| Penguji Akuntansi Keuangan | : Momen Suwandi, SE., M.Si. |
| Penguji Auditing | : Andri Wawa, SE., Ak. |
| Pelaksana | : Muhammad Irfan Mas'ud |
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

M A K A S S A R

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 10 Oktober 2017
Dekan

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

Sembilan

1. Ketua UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa
2. Para Dosen dalam Lingkup UIN Alauddin Makassar di Makassar
3. Asst



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1870 TAHUN 2017**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
A.n. Sri Roslina Umar, NIM : 10800113005
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Nama : Sri Roslina Umar, NIM : 10800113005, tertanggal 12 November 2017 untuk melaksanakan seminar hasil.
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2006 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar hasil, Jurusan **AKUNTANSI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Sekretaris : Dr. H. Abd. Wahab, SE., M.Si.
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Pembimbing II : Sumartini, SE., M.Ak.
Penguji I : Mustakim Muchlis, SE., M.Si.
Penguji II : Mamen Suwandi, SE., M.Si.
Pelaksana : Drs. H. M. Ridwan, M.Si.

1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar hasil penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

- Kedua** : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 14 November 2017
a.n Dekan,
Kuas: 5839/EB.1/Kp.07.6/2017
Tanggal : 13 November 2017

Dr. H. Abd. Wahab, SE., M.Si.
NIP. 19720421 200801 1 006



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2025 TAHUN 2017**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat permohonan : Sri Roslina Umar
NIM : 10800113005
Tanggal : 21 November 2017
Mahasiswa Jurusan : Akuntansi
- Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul "Analisis Pengendalian Internal dan Trilogy Akuntabilitas untuk Mencegah Terjadinya Fraud pada Sistem Manajemen Haji (Studi Pada Kementerian Agama Wilayah Bulukumba)"
- Menimbang** : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI. No. 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 241 B Tahun 2010 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi
- Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Sekretaris : Dr. H. Abd. Wahab, SE., M.Si.
Penguji I : Mustakim Muchlis, SE., M.Si.
Penguji II : Memen Suwandi, SE., M.Si.
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Pembimbing II : Sumartin, SE., M.Ak.
Pelaksana : Drs. H. M. Ridwan, M.Si.
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 23 November 2017



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIM 10800113005

L

A

M

P

I

R

A

N



LAMPIRAN MANUSKRIP

Tempat penelitian : Kementerian Agama Bulukumba

Informan :-Kepala seksi haji dan umroh yang bertanggungjawab atas/ Bapak H.A. Mapparolla. S.Ag, M. Pdi

- Staf yang berada dalam naungan kasi haji dan umroh

- Masyarakat calon jamaah dan masyarakat yang sudah berhaji

1. Bagaimana sistematis pendaftaran haji?

Calon jamaah mendatangi Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba untuk memperoleh Surat Permohonan Pendaftar Haji (SPPH). Syarat-syarat untuk mendapatkan SPPH yaitu Menyerahkan foto kopi KTP sebanyak 5 lembar, dan Menyerahkan foto kopi Kartu Keluarga (KK), menyerahkan pas foto 4x6 dan 3x4 sebanyak 5 lembar dan Menyerahkan foto kopi Akta lahir. Pengambilan foto yang dilakukan oleh petugas haji Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba dengan dikenakan biaya dengan alasan karena kemenag telah menyediakan fasilitas foto studio yang dilengkapi dengan kostum atau jas biru agar foto jamaah haji serentak .

2. Bagaimana cara seseorang bias masuk sebagai daftar tunggu ?

Adanya keputusan OKI tahun 1987 yang menyatakan bahwa untuk setiap negara yang akan masuk tiap tahunnya ke Tanah suci dalam melaksanakan

Ibadah haji sudah ditetapkan porsi kuotanya untuk tiap Negara. Representatif jumlah kuota tiap tahunnya diberikan atas jumlah penduduk Islam tiap negara, selanjutnya pembagian kuota yang diberikan dibagi ke tiap Provinsi, dengan pembagian jumlah yang sama yaitu pembagian berdasarkan jumlah penduduk Islam. Untuk Bulukumba sendiri dengan jumlah penduduk Islam yang dimiliki sebanyak kurang lebih 400 jiwa maka jumlah kuotanya tahun ini sebanyak 400 lebih. Dari pembagian itulah sehingga muncul *waiting list*. Hal ini karena jumlah pendaftar yang ada tiap tahunnya sekitar 10.000 ribu orang, sedangkan kuotanya hanya sekitar 400 kurang lebih, yang akhirnya sisa dari itu menjadi daftar tunggu selanjutnya atau *waiting list*.

3. Sejak kapan Siskohat diterapkan di Kementerian Agama Bulukumba?

Di Bulukumba sendiri dimulai sejak tahun 2009 dan sebelum adanya Siskohat sistem pelayanan haji menggunakan sistem manual, dan pengaturan keberangkatan berdasarkan berapa jumlah orang yang mendaftar dan pada zaman itu tidak ada namanya antrian.

4. Apa fungsi dari diterapkannya SISKOHAT di Kementerian Agama Bulukumba

Keberadaan SISKOHAT saat ini memberikan kontribusi yang besar dalam pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia, SISKOHAT mempunyai beberapa fungsi : 1) Pendaftaran dan penyimpanan database jemaah dan petugas. Ketersediaan database jemaah haji yang semakin terstruktur, dapat mempermudah dan mempercepat melakukan kesiapan-

kesiapan dan penyediaan pelayanan akomodasi atau transportasi lebih lanjut; 2) Pendaftaran haji dapat dilakukan sepanjang tahun (non stop); 3) Pemrosesan dokumen paspor dan pemvisaan; 4) Penerbitan Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji (DAPIH); 5) Pembayaran BPIH oleh BPS BPIH secara online dan pada waktu yang bersamaan (realtime) langsung dapat dihitung jumlah total dana keuangan setoran BPIH yang tersimpan di setiap BPS BPIH; 6) Pelaksanaan sistem akuntansi BPIH; 7) Proses pembatalan; 7) Penyusunan manifest dan kelompok terbang (kloter); 8) Pemantauan (monitoring) On Time Performance (OTP) penerbangan; 9) Pemantauan kesehatan jemaah haji; 10) Pemantauan operasional haji di Tanah Air dan di Arab Saudi.

5. Sistem pengendalian Internal apa yang digunakan?

Sistem pengendalian internal yang paling bisa terlihat adalah dengan penerapan SISKOHAT, jadi semua data terkait calon jemaah haji dan dana haji sudah tercantum langsung kedalam siskohat tersebut, jadi walaupun seseorang mencoba melakukan tindakan manipulasi data misalnya, akan dengan mudah dideteksi oleh siskohat, karena cara pengolahan siskohat, dimulai dari sidik jari sampai dengan mata semua di scan. artinya pengendalian internal dalam kementerian agama dalam hal seksi haji yah itu adanya siskohat itu.

6. Bagaimana pendapat anda dengan pentingnya sebuah akuntabilitas ?

Kami menjalankan pekerjaan ini dengan keikhlasan, dengan fungsi kami melayani masyarakat dengan baik, ada istilah bahwa setiap masyarakat yang datang disini itu beragam, jadi sebelum melayani mereka kita akan melihat bagaimana orang tersebut, istilahnya kita akan membiarkan dia menyampaikan maksud dan tujuannya, dan melayaninya dengan apa yang diinginkan. Dan yang paling rumit saat calon jamaah haji itu tidak mengetahui apapun dalam melakukan registrasi, jadi dengan sabar kami membantu mereka bahkan tidak jarang kami menuliskan manual data pribadi calon jamaah haji agar calon jamaah haji tidak mengalami kerumitan dalam pengisian dalam mendaftar haji.

7. Apakah anda bekerja dengan menganggapnya sebagai ibadah? Bagaimana pendapat anda dengan hal tersebut?

Seperti halnya waktu satu minggu yang lalu ada keluarga dari salah satu staf kami datang untuk mendaftar sebagai calon jamaah haji, namun waktu pelayanan kami sudah tutup, karena waktu itu sudah masuk waktu waktu sholat dan istirahat, namun keluarga tersebut malah minta dilayani, dengan memberikan tawaran untuk idia membelikan makanan kepada staf saya. Namun dengan tegas karyawan kami mengatakan, akan lebih baik dan anda mungkin membantu saya jika anda tidak melakukan hal tersebut.

LAMPIRAN







RIWAYAT HIDUP



Assalamualaikum perkenalkan saya bernama **Sri Rosfina Umar** atau yang akrab dipanggil fina, Lahir di kasuara. Bulukumba 24 November 1995 tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Anak ketiga dari 7 bersaudara Lahir dari pasangan Umar dan Suhartini. Menempuh pendidikan dari SDN 181 tanah kongkong lanjut ke SMP terbuka 1, dan mengenyam bangku SMA Negeri 2 bulukumba (sekarang

SMA Negeri 8) Dan Alhamdulillah berkat Allah SWT dan doa dari kedua orang Tua pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah UIN Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi. Dan saat ini syukur alhamdulillah telah menyelesaikan studi S1 selama kurang lebih 4 tahun. Sebagai penutup *“tidak perlu jadi orang kaya untukmu diakui sebagai hebat, cukup capai impianmu dengan membanggakan kedua orangtua serta orang yang saya padamu serta bekerja keras dan sungguh kau sudah menjadi orang hebat”*